

**RELASI PEREMPUAN DAN JABATAN PUBLIK
DI PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**HIKMAH YANI CHANIAGO
NIM. 170801056**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
TAHUN 2021**

**RELASI PEREMPUAN DAN JABATAN PUBLIK
DI PEMERINTAHAN KOTA SUBUSSALAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Beban Studi Program S-1
Dalam Ilmu Politik

Oleh:

HIKMAH YANI CHANIAGO
NIM. 170801056

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

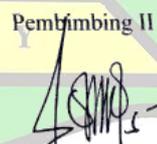
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Ade Irma, B.H.Sc., MA
NIP. 197309212000032004

Pembimbing II



Ranzi Murziqin, MA
NIP. 198605132019031006

**RELASI PEREMPUAN DAN JABATAN PUBLIK DI PEMERINTAH KOTA
SUBULUSSALAM**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar- Raniry

Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program

Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/ Tanggal :

Senin, 07 Juli 2021 M
26 Zulkaidah 1442 H

Darussalam- Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua ,

Dr. Ade Irma, B.H.Sc., MA
NIP. 197309212000032004

Sekretaris,

Ranzi Murziqin, MA
NIP. 198605132019031006

Penguji I,

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed
NIP. 197810162008011011

Penguji II,

Rizkika Lhena Darwin, MA
NIP. 198812072018032001

Mengetahui ,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar- Raniry

Darussalam – Banda Aceh

Dr. Ernita Dewi S.Ag., M.Hum
NIP.197307232000032002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hikmah Yani Chaniago
NIM : 170801056
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Relasi Perempuan dan Jabatan Publik di Pemerintahan Kota
Subulussalam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

AR - RAN

Banda Aceh, 7 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Hikmah Yani Chaniago

ABSTRAK

Nama : Hikmah Yani Chaniago
NIM : 170801056
Fakultas / Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan / Ilmu Politik
Judul : Relasi Perempuan dan Jabatan Publik di
Pemerintah Kota Subulussalam
Tanggal Sidang : 07 Juli 2021
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ade Irma. B.H.Sc., MA.
Pembimbing II : Ramzi Murziqin, MA
Kata Kunci : *Relasi Perempuan, Relasi Gender, Politik Dinasti, Kota Subulussalam*

Pemilihan kepala daerah (Walikota) pertamakali dilaksanakan pada tahun 2008 di Kota Subulussalam. Posisi perempuan dalam jabatan publik belum terisi. Pemilihan kepala daerah kedua dilaksanakan pada tahun 2013 dan posisi perempuan sebagai pejabat publik terisi satu kursi di dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Paska pemilihan kepala daerah ketiga di tahun 2018 terdapat penambahan jumlah perempuan yang menjabat di lingkup pemerintahan eksekutif sebanyak enam orang, diantaranya Kepala Dinas Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB, Camat, Direktur Umum Rumah Sakit Daerah, dan Kepala Puskesmas Simpang Kiri. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana relasi daya tawar perempuan dalam mendapatkan jabatan publik, kemudian apa tantangan yang didapatkan oleh perempuan dalam mendapatkan jabatan publik tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data yang berupa kata-kata, ide, persepsi, pendapat yang tidak dapat diukur dengan angka. Hasil penelitian ditemukan bahwa strategi perempuan dalam mendapatkan jabatan publik ialah adanya hubungan kekerabatan antara pejabat perempuan dengan walikota, adanya hubungan walikota dengan penegak hukum, kemudian faktor profesionalisme pejabat perempuan. Tantangan yang diperoleh perempuan ialah, nilai patriarki, keseimbangan pekerjaan dan keluarga, peran sosial, pengaruh aktivitas, dan komunikasi. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa, strategi dan daya tawar yang dilakukan oleh perempuan dalam jabatan publik ialah adanya hubungan kekerabatan dan hadirnya praktik dinasti politik antara pemerintah daerah dengan pejabat perempuan. Kemudian tantangan yang didapatkan perempuan nyatanya didapatkan dari stereotip masyarakat sosial yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai patriarki, maskulinitas, dan ketidaksetaraan gender di Kota Subulussalam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'alla, karena Rahmat dan karunia-Nya, penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Relasi Perempuan dan Jabatan Publik Di Pemerintah Kota Subulussalam”**. Penelitian ini penulis ajukan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan oleh Allah *subhanahu wata'ala* kepada Baginda Rasulullah, Nabi Muhammad *shallallahu'alaihi wasallam* beserta segenap keluarga dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Selama penulis menyelesaikan penulisan ini, penulis banyak mengalami kendala serta hambatan. Namun, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan selesai, jika tidak ada bantuan dari berbagai pihak. Penulis menyadari ada begitu banyak kekurangan di dalam skripsi ini, sehingga penulis sangat membutuhkan kritikan serta saran yang membangun, agar penulis bisa lebih baik lagi kedepannya. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada :

1. Terima Kasih kepada Allah SWT. Dan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.

2. Ibunda Tercinta Hj. Mardaa Maha, Kakak dan Abang Serta Keluarga Besar yang telah mendo'akan, menyemangati, baik dari segi materil maupun non materil.
3. Prof. Dr. Warul Walidin, AK. MA, selaku Rektor Uin Ar-Raniry.
4. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.
5. Dr. H. Abdullah Sani, Lc, M.A, selaku Ketua Prodi Ilmu Politik. Rizkika Lhena Darwin, M.A selaku Sekretaris Prodi Ilmu Politik. Dr. H. Abdullah Sani, Lc, M.A,selaku Penasehat Akademik beserta jajarannya.
6. Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A selaku pembimbing I dan Bapak Ramzi Murziqqin, M.A selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Kepada orang-orang terdekat Lidya S.IP ,Rita Sariyani, Afryani Maha, Rini Dayanti, Sarah Shakira Bancin dan Aldis Peristiwa Dari.
8. Teman-teman seperjuangan  Ilmu Politik Angkatan 2017 Yulis Syahputra, Nurvina Zahra, Widya Safitri, Nella Rosa, Anissa Rossa, Senior Ilmu Politik Nyanyak Marawan Putri S.IP, dan sahabat-sahabat penulis (Tim Nguli) dengan motivasi dari kalian semua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Narasumber dari pihak pejabat pemerintah Kota Subulussalam yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.

10. Semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima Kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

Banda Aceh, 7 Juli 2021
Penulis,



Hikmah Yani Chaniago

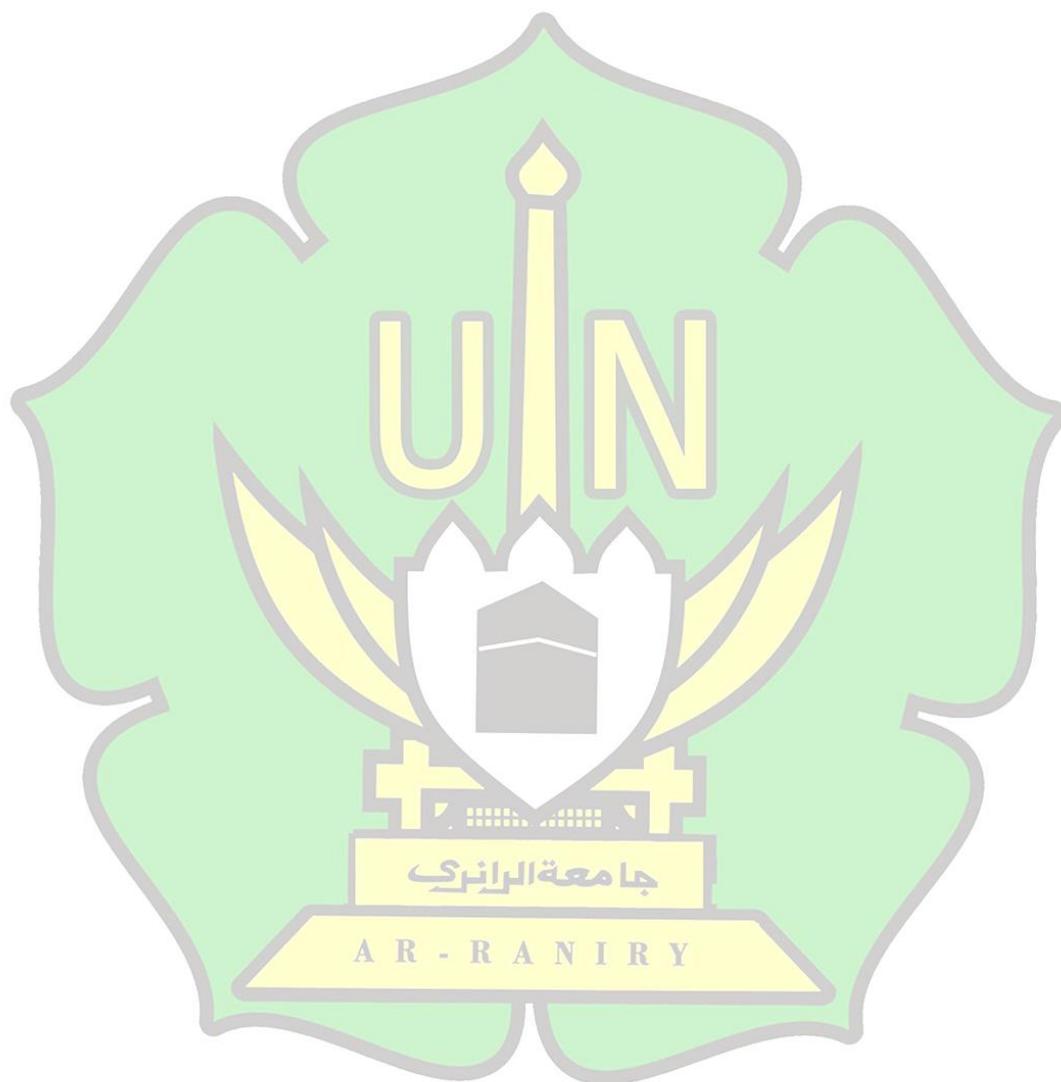


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kajian Pustaka.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1 Relasi.....	13
2.2 Dinasti Politik.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Pendekatan Penelitian	26
3.2 Fokus Penelitian.....	26
3.3 Lokasi Penelitian	26
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	27
3.5 Informan Penelitian.....	27
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.7 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahaan Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1 Potret Perempuan Pada Posisi Publik di Kota Subulussalam.....	30
4.2 Strategi dan Daya Tawar Perempuan sebagai Pejabat Politik	38
4.3 Tantangan Perempuan dalam Mendapatkan Posisi sebagai Pejabat Publik.....	47
BAB V PENUTUP	53
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSATAKA	55

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	27
Tabel 4.1 Jumlah Anggota DPRD Kota Subulussalan	33



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan jaman saat ini telah banyak mengubah pandangan serta pemikiran tentang perempuan dalam bekerja di sektor publik, khususnya ketika berbicara konteks peran perempuan dalam lembaga pemerintahan. Jika sebelumnya banyak yang berpandangan bahwa perempuan hanya berhak mengurus rumah dan selalu berada di rumah, namun untuk saat ini telah mengalami perubahan yang menunjukkan bahwa perempuan sudah mulai memiliki peran di dalam lembaga pemerintahan.¹

Penelitian ini meneliti tentang posisi perempuan di lembaga eksekutif dan relasi daya tawar perempuan dalam meraih posisi tersebut. Hal ini menjadi menarik karena posisi perempuan di ranah eksekutif Pemerintah Subulussalam biasanya menjadi domain laki-laki sejak tahun 2007.² Pada tahun tersebut Kota Subulussalam pertama kali resmi berstatus sebagai kota. Namun mengalami pergeseran tren di mana terdapat peningkatan jumlah perempuan yang mengisi posisi di lembaga eksekutif. Peningkatan jumlah perempuan pada posisi eksekutif sangat dipengaruhi oleh kepala daerah yang terpilih dari hasil Pilkada langsung. Karena posisi eksekutif merupakan hak otoritatif dari kepala daerah terpilih.

¹Leny Nofianti, "Perempuan di Sektor Publik, Riau", *Jurnal Marwah* Vol. XV, No.1, Juni 2016, hlm.,51.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007*, Tentang Pembentukan Kota Subulussalam Di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam No. 08.

Pilkada di Subulussalam dimulai pada tahun 2008.³ Pada tahun tersebut merupakan pilkada pertama kalinya setelah Kota Subulussalam mengalami pemekaran berpisah dengan Kabupaten Aceh Singkil. Hasil pilkada tersebut dimenangkan oleh pasangan calon H. Merah Sakti. SH dengan H. Affan Alfian bintang. SE. Sehubungan dengan keluarnya peraturan tentang desentralisasi maka pemimpin di suatu daerah berhak dan memiliki wewenang untuk mengurus urusan rumah tangga pemerintahannya sendiri, termasuk memilih dan menetapkan pejabat di lembaga eksekutif. Pada masa kepemimpinan Merah Sakti di tahun 2008 tersebut kehadiran perempuan di lembaga eksekutif tidak mendapatkan jabatan sama sekali, dan kebanyakan pimpinan dan pejabat di lembaga eksekutif didominasi oleh laki-laki.

Selanjutnya pada pilkada Kota Subulussalam pada tahun 2013,⁴ dan pilkada tersebut dimenangkan oleh petahana yaitu H. Merah Sakti. SH berpasangan dengan Salamaza. SE, MAP. Pada periode kedua H. Merah Sakti mulai mengisi perempuan pada jabatan eksekutif seperti Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, dan ternyata kepala dinas perempuan yang berhasil mendapatkan posisi strategis tersebut merupakan istri dari Merah Sakti yang saat itu berstatus sebagai kepala daerah. Terisinya posisi perempuan pada tahun 2013 tersebut ternyata didukung oleh campur tangan laki-laki (suami) yang merupakan Walikota Subulussalam pada periode tersebut.⁵

³ Subulussalam Online, hasil pilkada subulussalam ditetapkan, oktober 2008. Diakses pada tanggal 12 Desember dari Situs:
<http://www.google.com/amp/s/subulussalamkota.wordpress.com/2008/10/28/hasil-pilkada-subulussalam-ditetapkan/amp/>.

Pilkada Kota Subulussalam tahun 2018, dimenangkan oleh. H. Affan Afian Bintang dan Salmaza. M. AP. Pada periode pemerintahan ini kehadiran perempuan di lembaga eksekutif sebagai pimpinan mengalami peningkatan dimana pada periode sebelumnya hanya satu keterwakilan perempuan. Namun ditahun 2019 terdapat enam perempuan yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga eksekutif di Kota Subulussalam. Jabatan pimpinan yang berhasil di isi oleh perempuan tersebut ialah diantaranya sebagai Kepala Dinas, Direktur Umum Rumah Sakit Ibu Dan Anak Daerah Kota Subulussalam, Camat Simpang Kiri, Dan Kepala Puskesmas Simpang Kiri. Dari ke-enam perempuan tersebut berhasil memiliki jabatan di lembaga eksekutif Kota Subulussalam ditahun 2019 pada periode kepemimpinan H. Affan Alfian Bintang dan Salmaza.

Peningkatan posisi perempuan di lembaga eksekutif Kota Subulussalam dikarenakan beberapa faktor, salah satunya ialah terjadinya modernisasi yang terjadi di kalangan masyarakatnya. Contohnya modernisasi individualisme dimana masyarakat memiliki hak pada diri sendiri dalam melihat serta memaknai bingkai dari terjadinya modernisasi. Kemudian hadirnya teknologi dan organisasi yang menghubungkan langsung dengan jaringan akses internet sehingga menjadikan masyarakat di Subulussalam lebih memahami bagaimana perkembangan yang terjadi dalam konteks modernisasi di Kota Subulussalam, dan pada hasilnya masyarakat Subulussalam tidak ada yang menolak terkait hadirnya perempuan di lembaga pemerintahan Kota Subulussalam.

Rasionalisme yang lahir dalam pola pikir masyarakat juga menjadi perhitungan bahwa sebenarnya modernisasi merupakan sebuah spesies dan

keterampilan baru yang hadir di dalam pola pikir masyarakat Subulussalam. Persaingan dalam pendidikan juga menjadi salah satu indikator meningkatnya relasi perempuan di lembaga eksekutif Kota Subulussalam.⁴ Perubahan yang dibawa oleh modernisasi melalui jalan industrialisasi dan kemajuan pada akhirnya berdampak dan membawa perubahan relasi perempuan dalam ranah publik.

Beberapa faktor lain menjadi alasan mengapa perempuan berhasil mendapatkan posisi di lembaga eksekutif Kota Subulussalam.⁵ Diantaranya ialah posisi camat, bila ditinjau berdasarkan relasi maka camat Simpang Kiri yang terpilih sebagai camat tentu ada kelebihan dari sumber daya yang dimiliki. Begitu pula dengan kepala dinas kesehatan, dan kepala dinas transmigrasi dan pekerjaan umum, hadirnya politik dinasti yang menjadikan perempuan tersebut bisa membangun relasi sehingga menjadi modal untuk bisa mendapatkan posisi strategis pada posisi pejabatan publik di pemerintahan kota Subulussalam. Kemudian latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang dimiliki juga menjadi salah satu modal bagi perempuan tersebut sehingga berhasil mendapatkan posisi sebagai pejabat.⁶

⁴Ju Lan Thung “ Women and Modernization”. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol.17, No.1, 2015, hlm. 19.

⁵MC Kota Subulussalam, Wali Kota Lantik Perdana Camat Perempuan Di Kota Subulussalam, November 2019. Diakses pada tanggal 26 februari 2021 dari situs: <https://infopublik.id/kategori/nusantara/389736/wali-kota-lantik-perdana-camat-perempuan-di-kota-subulussalam?show>

⁶Website resmi kota subulussalam, kepala dinas pemberdayaan perempuan anak dan kb kota subulussalam, Desember 2019. Diakses pada tanggal 26 februari 2021 dari situs: <http://subulussalamkota.go.id/pejabat/kepala-skpk>

Faktor yang sama juga terjadi terhadap kepala dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Direktur umum Rumah Sakit ibu dan Anak, serta kepala puskesmas simpang kiri.⁷ Dari gambaran data awal tersebut menjadi salah satu faktor apa yang mempengaruhi peningkatan posisi perempuan dalam lembaga eksekutif di kota subulussalam.

Kehadiran perempuan di ranah pemerintahan Kota Subulussalam nyatanya menjadi fenomena baru dimana biasanya posisi strategis dan jabatan di ranah pemerintahan menjadi domain laki-laki. Penelitian ini akan melihat mengapa posisi strategis dan jabatan di pemerintahan Kota Subulussalam mampu di raih oleh perempuan sebagaimana sebelumnya telah dijelaskan terdapat enam posisi strategis yang di jabat oleh perempuan, apa yang perempuan tersebut berikan sebagai *treck record* kepada walikota selaku kepala daerah sehingga perempuan tersebut mendapatkan posisi dan jabatan di ranah pemerintahan Kota Subulussalam.

⁷ Website resmi kota subulussalam, kepala dinas pemberdayaan perempuan anak dan kb kota subulussalam, Desember 2019. Diakses pada tanggal 26 februari 2021 dari situs: <http://subulussalamkota.go.id/pejabat/kepala-skpk>

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana relasi daya tawar perempuan dalam mendapatkan jabatan publik di pemerintah Kota Subulussalam?
2. Bagaimana tantangan perempuan dalam mendapatkan jabatan publik di pemerintah Kota Subulussalam?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Agar mengetahui bagaimana relasi daya tawar perempuan dalam mendapatkan jabatan publik di pemerintah Kota Subulussalam.
2. Agar mengetahui bagaimana perempuan dalam mendapatkan jabatan publik di pemerintah Kota Subulussalam.

1.4 Kajian Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai persamaan atau perbedaan yang sudah ada. Selain itu peneliti juga menggali informasi dari skripsi, jurnal, buku, dan artikel untuk mendapatkan informasi sebelumnya tentang judul yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

1. Skripsi Destya Darsiana dari Universitas Syahkuala Kota Banda Aceh, dengan judul “Kepemimpinan Perempuan Dalam Jabatan Publik”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemimpinan perempuan di sektor publik, teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori kepemimpinan dengan

pendekatan gender. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di Banda Aceh tepatnya di Universitas Ubudiyah Indonesia, balai kota dan kantor dewan perwakilan rakyat aceh (DPRA). Proses pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini telah ditetapkan sebelumnya yang berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari rektor universitas ubudiyah.⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Destya Darsiana sama-sama ingin melihat tentang bagaimana kepemimpinan perempuan dilembaga eksekutif di Kota Subulussalam, dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah jika penelitian destya darsiana diambil di Kota Banda Aceh sedangkan penelitian ini berlokasi di Kota Subulussalam, dengan mengangkat permasalahan ini saya ingin melihat bahwa bagaimana relasi perempuan dalam sektor publik di Subulussalam.

2. Tulisan Rizka P.A.D. Dari Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik dalam Jurnal Eksekutif dengan judul. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi Pemerintahan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara". Kesimpulan dalam penelitian ini ialah mengetahui peran kepemimpinan perempuan mempunyai hak atau kesempatan dalam birokrasi pemerintahan yang ada di kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan menggunakan

⁸ Destya Darsiana, "*Kepemimpinan Perempuan Dalam Jabatan Publik*" (Skripsi), Fakultas FISIPOL Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2016, hlm. 15.

penelitian metode kualitatif, dengan menggunakan teori persamaan Hak antara perempuan dan laki-laki. Hasil dari penelitian ini ialah menunjukkan bahwa perempuan terikat dengan sifat kodrati, agama, dan adat istiadat, maknanya adalah walaupun seorang perempuan telah menjadi pemimpin tertinggi dalam lembaga eksekutif.⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rizka P.A.D sama-sama ingin melihat tentang bagaimana kepemimpinan perempuan dilembaga eksekutif di Kota Subulussalamterkhusus dalam birokrasi, dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah jika penelitian Rizka P.A.D diambil di Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2018 sedangkan penelitian ini berlokasi di Kota Subulussalam pada tahun 2019, dengan mengangkat permasalahan ini saya ingin melihat bahwa bagaimana relasi perempuan dalam sektor publik di Subulussalam.

3. Tulisan Rahma Hidayati dari Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Kabupaten Aceh Barat, dengan judul "Gender dan Gaya Kepemimpinan Perempuan Di Jabatan Publik: Studi Fenomenologi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh" pada penelitian ini membahas tentang bagaimana wanita aceh yang memiliki gaya yang sangat unik dalam segi kepemimpinan moralis yang khas dan semangat juang yang tinggi sehingga

⁹ Rizka P.A.D, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi Pemerintahan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara". *Jurnal Unsrat*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm 21.

dijuluki dengan “Cut Nyak Dhien”. Ciri-ciri tersebut melekat pada identitas perempuan aceh yang mampu berintegrasi untuk pencapaian tujuan organisasi. Tujuan penelitian tersebut ialah untuk mengetahui bagaimana gaya unik yang dimiliki perempuan aceh sehingga bias menjadikannya sebagai pemimpin disuatu jabatan publik dan mendapatkan posisi tersebut.¹⁰

Persamaan dalam penelitian Rahma Hidayati ini dengan penelitian saya ialah, secara bersamaan bahwa subulussalam sebagai kota yang berada dalam provinsi aceh mampu melahirkan wanita-wanita tangguh layaknya Cut Nyak Dhien sehingga kesamaan dalam penelitian ini ialah lokasi penelitian yang diambil sama-sama berbicara konteks perempuan tangguh di aceh.

4. Tulisan Husain Hamka dari Universitas Hasanuddin Makasar dengan judul “Kepemimpinan Perempuan Dalam Era Modern” pada penelitian ini dimaksud untuk melihat perkembangan perempuan di era modern, dalam kacamata gender dan religious, sejauh ini pergeseran ataupun perubahan sosial terkait budaya patriarki semakin menurun, dimana berperanya perempuan dalam lembaga pemerintahan atau instansi publik menjadikan bukti bahwa berdampaknya proses modernisasi dalam setiap Negara. Tujuan penelitian ini ialah melihat bagaimana pandangan Islam terkait dengan keberadaan perempuan dalam jabatan-jabatan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian menggunakan analisis sosiologi agama.¹¹

¹⁰Rahma Hidayati, “Gender dan GayaKepemimpinan Perempuan Di Jabatan Publik: Studi Fenomenologi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh”. *Jurnal UTU*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm 37.

¹¹Husein Hamka, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Era Modern”. *Jurnal Alqalam*, Vol. 19, No. 1, januarai 2016, hlm 19

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Husain Hamka ialah ingin melihat tentang bagaimana kepemimpinan perempuan di lembaga publik seperti menteri, wakil presiden, dan pimpinan di sebuah lembaga di seluruh Indonesia, dan letak perbedaannya ialah lokasi penelitian dan waktu penelitian. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama mengambil objek penelitian dan ruang lingkup penelitian yang sama-sama meneliti terkait perempuan di era modern dan berkaitan dengan keislaman.

5. Buku *Representasi Perempuan Dalam Kebijakan Publik Di Era Otonomi Daerah* Women Research Institute. Oleh Lisabona Rahman, Edriana Noerdin, Siti Aripurnama, dan Ratna Laelasari Yuningsih. Dalam buku ini menjelaskan bahwa dalam UU Otonomi daerah tahun 1999 telah memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan politik dan pengaturan keuangan. Representasi perempuan dalam kebijakan publik di era otonomi daerah seharusnya menjadikan peran perempuan semakin terangkat didalam perannya di dunia politik dan pemerintahan.¹²

Kasus ini sama dengan Subulussalam dimana sekarang era otonomi sudah diterapkan di Indonesia sehingga menjadikan pemerintah daerah dalam mengatur sendiri rumah tangga daerahnya. Hal inilah yang kemudian menjadi pendukung bagaimana pemerintah daerah Subulussalam mengatur urusan pemerintahnya dengan melibatkan perempuan didalam lembaga eksekutif di

¹²Lisabona Rahman, Edriana Noerdin, Siti Aripurnama, dan Ratna Laelasari Yuningsih, *Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah*, (Jakarta: Women Research Institute, 2005), hlm 89.

subulussalam. Penelitian ini sama dengan penelitian yang akan saya teliti dimana focus dan sasarnya sama-sama terkait dengan peran perempuan di era otonomi daerah, dengan Lokus di Subulussalam-Aceh.

6. Tulisan Leny Nofianti seorang dosen dari Universitas Islam Negeri Suksa Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan judul “Perempuan Di Sektor Publik” pada penelitian ini menjelaskan bagaimana peran produktif dan peran formal perempuan dalam ranah publik, perempuan yang bekerja ranah publik pada umumnya memiliki pendidikan yang cenderung tinggi, serta bagaimana masalah, tantangan, dan persoalan gender yang dihadapi oleh perempuan ketika bekerja di sektor publik, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan langsung mengumpulkan data-data melalui wawancara langsung dengan komunikan.¹³

Persamaan yang penelitian ini dengan penelitian leny nofianti ialah, memiliki kesamaan dari segi objek penelitiannya, teori dan metode penelitiannya yakni dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, kemudian perbedaan penelitian ini dengan penelitian Leny Nofianti ialah, lokasi penelitian yang berberda serta tahun penelitian, dimana pada penelitian Leny Novianti di teliti pada tahun 2016 namun penelitian ini diteliti pada tahun 2019.

¹³Leny Nofianti, “Perempuan Di Sektor Publik”. *Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, Vol. 15, No. 1, 2016, hlm. 35.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Relasi

2.1.1 Relasi Kekuasaan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan relasi sebagai hubungan, perhubungan, pertalian, pelayan dan pelanggan. Gramsci mengatakan kelas yang lebih rendah hanya dapat menjadi kelas hegemonik dengan cara memperkuat kemampuan untuk memperoleh dukungan dari kelas dan kekuatan sosial lain. Kelompok kelas yang lebih rendah harus mampu melampaui aktifitas korporasi dalam lingkup setempat, yaitu aktivitas ketika mereka hanya peduli dengan kepentingan mereka sendiri yang bersifat sesaat dan harus bergerak maju menuju fase hegemonik dengan memperhatikan juga kepentingan kelas dan kelompok lain. Hubungan antara dua kelas utama feodal dan kapitalis atau kapitalis dan kelas pekerja bukan merupakan suatu hubungan oposisi yang sederhana antara dua kelas tetapi merupakan anyaman dari beberapa hubungan yang rumit dan melibatkan berbagai kelas kelompok dan kekuatan sosial lain.¹⁴

Sejauh ini gramsci memberikan definisi Marxis klasik terhadap lahirnya sebuah kelas mengenai hubungan kekuatan politik. Ia mengambil contoh munculnya kelas kapitalis dan membedakan kelas tersebut menjadi tiga fase perkembangan terhadap kesadaran politik kolektif dan organisasi. Fase yang pertama adalah fase yang paling awal terjadi ketika seseorang pedagang harus

¹⁴Roger Simon, *Gramsci's Political Thought*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.

mampu berdiri sejajar dengan pedagang lainnya begitu pula dengan seorang penguasa dengan penguasa lainnya dan sebagainya. Namun pedagang tersebut belum mampu menimbulkan rasa untuk sudi bersolidaritas dari pengusaha. Anggota kelompok profesional sadar akan kepentingan untuk bekerjasama mereka menganggap perlunya untuk bersatu namun mereka belum menyadari bahwa penting untuk bergabung dengan kelompok lain ke demi mencapai kelas yang setara.

Fase kedua adalah fase yang lebih maju dimana telah tumbuh kesadaran akan kepentingan bersama terhadap semua kelas dalam bidang perekonomian dalam Fase ini masalah negara sudah diperhatikan namun hanya sebatas untuk memperoleh persamaan politik dan hukum dengan kelompok yang lebih berkuasa. Hak untuk ikut serta dalam menetapkan undang-undang dan administrasi, bahkan untuk mengubahnya demi tetap berada pada posisi aman namun harus tetap berada dalam struktur yang ada. Fase ketiga adalah fase yang disebut dengan hegemoni. Di mana orang menjadi sadar bahwa kepentingan perusahaannya menjadi faktor utama dalam perkembangan di masa sekarang dan di masa yang akan datang.

Melalui batas-batas korporasi kelas yang bersifat murni terkait ekonomi dan kepentingan itu didapatkan oleh kelompok yang lebih rendah. Ini adalah tahap untuk mencapai politik murni, dan ini adalah fase dimana ideologi-ideologi yang sebelumnya terpecah belah sekarang ideologi tersebut tergabung menjadi satu untuk tujuan-tujuan ekonomi dan politik intelektual dan moral serta mampu menghadapi semua persoalan sehingga perjuangan tidak berlangsung dalam

dataran korporasi saja namun dalam dataran universal yang pada akhirnya terciptalah hegemoni suatu kelompok sosial yang kuat terhadap kelompok lain yang lebih rendah.¹⁵

Teori gramsci ini dapat disimpulkan bahwa suatu kelas menjadi hegemoni jika ia mampu melampaui batas fase korporasinya dan berhasil menyatukan kepentingan kelas dan kekuatan sosial lain dengan kepentingannya sendiri. Serta berhasil menjadi representasi penuh dari kekuatan sosial utama dalam membangun bangsa kelas hegemonik yang berhasil membangun blok kekuatan sosial yang mampu bertahan sepanjang periode sejarah. Gramsci menyebut ini sebagai blok historis (*historic bloc*).¹⁶

Michle Foucault mendefisikan relasi kekuasaan dan dominasi yang menyadarkan kita bagaimana relasi kekuasaan (*power*) teranyam di setiap aspek kehidupan serta kehidupan pribadi. Hal ini bertentangan dengan keyakinan pada umumnya dalam ilmu sosial yang cenderung mengabaikan kekuasaan. Dalam dunia ilmu pengetahuan berasumsi bahwa pengetahuan itu netral, objektif dan tidak berdosa, kecenderungan memandang bahwa kekuasaan hanya terpusat di negara ataupun kelas. Menurut Foucault pada umumnya kekuasaan melahirkan pengingkaran terhadap kenyataan, karena relasi kekuasaan terdapat pada setiap aspek kehidupan. Konsep tentang kekuasaan biasanya memberikan pengaruh besar tentang bagaimana aspek dan pusat lokasi dari kekuasaan serta bentuk

¹⁵ Yuberti, "Gender and Power in Indonesian Islam". Jurnal Studi Keislaman. Vol, 15, No.2, Desember 2015, hlm. 533.

¹⁶ Ibid., hlm. 32

perjuangan untuk membatasi dan bagaimana berbagi kekuasaan tersebut. Jika pada umumnya pemikiran kekuasaan hanya tertuju pada negara dan kelas elit namun dalam pikiran Foucault membuka kemungkinan untuk membongkar semua dominasi dan relasi kekuasaan seperti kekuasaan dalam pengetahuan antara para pencipta diskursus, birokrat, akademisi dan rakyat miskin jelata yang “tidak beradab” yang harus disiplin dan diregulasi dan dibina.¹⁷

Kaum feminis juga mendapat legitimasi untuk membongkar dominasi dan relasi kekuasaan perspektif gender antara laki-laki dan perempuan yang sejak lama tidak mendapat perhatian. Filsafat sosial Michael Foucault juga memberi pengaruh terhadap relasi kekuasaan antara birokrat dan intelektual universitas yang dalam modern ini dianggap lebih ilmiah dan positifistik dibandingkan dengan masyarakat adat, masyarakat awam yang tradisional yang memiliki suku terasing seperti suku pedalaman yang tidak ilmiah yang lebih mempercayai tahayul yang tidak mampu mengelola sumber daya alam dan belum berbudaya. Sehingga perlu dibudayakan atau diberdayakan pikirannya tentang kekuasaan bahkan menyadarkan orang akan relasi kekuasaan antara organisasi dan pemerintahan dengan masyarakat binaan yang memiliki sistem kepercayaan adat lokal tidak ilmiah dan animisme ini.¹⁸

¹⁷ Sara Mills, *Routledge Critical Thinkers: Michel Foucault*, (New York: Routledge, 2003), hlm. 35

¹⁸ Muji Sutrisno, Hendar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 146.

Semestinya yang semua itu diberdayakan, dengan begitu masyarakat tersebut mungkin bisa menjalankan tugas transformasi jika pengetahuan mereka ada maka otomatis akan membongkar dan menghentikan relasi kekuasaan. Analisis yang dikenal sebagai *discourse analysis* adalah hasil pemikiran Foucault terhadap teori perubahan sosial yang memungkinkan teori tersebut membongkar relasi kekuasaan dan dominasi pada suatu konsep atau wacana pembangunan karena konsepsi dan wacana pembangunan memang tidak pernah netral, objektif dan bebas nilai.

2.1.2 Relasi Gender

Relasi ini menjelaskan tentang pembagian peran antar dua kelompok. Jika dilihat berdasarkan kacamata feminisme Mansour Fakih beranggapan bahwa feminisme hadir untuk membandingkan peran antara laki-laki yang dianggap kuat dengan perempuan yang dianggap lemah. Biasanya laki-laki yang dianggap mampu mencari nafkah seolah menimbulkan pelebelan negatif terhadap perempuan yang dianggap cukup bekerja pada ruang privat saja. Pendekatan *women in development* yang pada dasarnya merupakan perspektif feminisme liberal menghasilkan *women fokus project of evelopment* setelah *woman in development* dilaksanakan selama satu dekade sejak dekade pertama pembangunan perempuan PBB. Ternyata berbagai program peningkatan peran perempuan tersebut dianggap gagal untuk mengubah nasib berjuta-juta kaum

perempuan di seluruh dunia. Ternyata banyak program pembangunan tersebut mempunyai dampak berbeda bagi kaum perempuan.¹⁹

Pembangunan tersebut nyatanya gagal membebaskan perempuan dari diskriminasi dan ketidakadilan. Atas dasar itulah suatu pendekatan baru yang tidak menyalahkan korban ketidakadilan dan yang terlalu memfokuskan terhadap kaum perempuan mulai dikaji. Salah satu yang dianggap menjadi persoalannya ialah bukan terletak pada kaum perempuannya melainkan pada ideologi yang dianut oleh kaum laki-laki maupun perempuan yang sangat berpengaruh dalam kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, yakni bias gender dalam pembangunan. Akibat dari kebijakan pembangun yang bias gender atau buta gender tersebut, banyak program pembangunan telah mempunyai dampak yang berbeda terhadap kaum lelaki dan terhadap perempuan. Atas dasar itulah suatu diskursus tandingan terhadap *women in development* telah lahir yang menjabarkan tentang pendekatan yang sepenuhnya menggunakan analisis gender.

Analisis gender hadir sebagai alat analisis sosial konflik yang memusatkan perhatian pada ketidakadilan struktural yang disebabkan oleh keyakinan gender yang mengakar dan tersembunyi di berbagai tempat terutama pada tradisi masyarakat, keyakinan keagamaan, serta kebijakan dan perencanaan pembangunan. Akibat dari bias gender yang tersembunyi pada pelaksanaan proyek pembangunan misalnya, jutaan perempuan secara tidak sengaja telah

¹⁹ Mansour Fakih, *Runtuhnya teori pembangunan dan globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 31

menjadi korban atau dikorbankan oleh proyek pembangunan tersebut. Karena bias gender pada umumnya tidak disadari oleh pelakunya. Para perencana dan pelaksana program pembangunan tidak pernah merasa dan menyadari bahwa mereka telah mendiskriminasi kaum perempuan, kata gender sendiri adalah berasal dari bahasa Inggris yang berarti suatu pemahaman-pemahaman sosial budaya tentang apa dan bagaimana lelaki dan perempuan seharusnya berperilaku.

Analisis gender memberikan perangkat teoritik untuk memahami sistem ketidakadilan gender, kedua jenis kelamin baik pria maupun perempuan bisa menjadi korban dari ketidakadilan gender tersebut. Namun karena mayoritas yang menjadi korban ketidakadilan gender adalah kaum perempuan seolah-olah analisis gender hanya menjadi alat perjuangan kaum perempuan saja, analisis gender justru menjadi alat gerakan feminisme untuk menjelaskan sistem ketidakadilan sosial. Tanpa analisis gender gerakan feminisme akan menjadi reduksionisme yang lebih memusatkan perhatian perubahan sosial bagi kaum perempuan belaka.

Analisis gender membantu memahami bahwa pokok persoalannya adalah sistem dan struktur yang tidak adil bagi baik lelaki maupun perempuan yang menjadi korban dan mengalami dehumanisasi. Karena sistem ketidakadilan gender tersebut kaum perempuan mengalami dehumanisasi, sementara kaum lelaki menjadi dehumanisasi karena melanggengkan penindasan gender. Selanjutnya analisis gender ini memungkinkan gerakan feminisme memfokuskan pada relasi atau struktur gender serta keluar dari pemikiran yang memfokuskan kepada perempuan. Dengan demikian yang menjadi agenda utama setiap usaha perubahan sosial tidak sekedar menjawab kebutuhan praktis atau merubah kondisi

kaum perempuan melainkan juga menjawab kebutuhan strategis kaum perempuan yakni memperjuangkan perubahan sosial. Kaum perempuan termasuk counter hegemoni dan counter *discourse* terhadap ideologi gender yang telah mengakar dalam keyakinan baik kaum perempuan maupun kaum lelaki, usaha dan perubahan struktur gender inilah yang dikenal dengan pendekatan *gender and development*.

2.2 Dinasti Politik

Dinasti politik telah lama hadir di negara demokrasi, menimbulkan kekhawatiran bahwa ketidaksetaraan distribusi kekuasaan politik mungkin mencerminkan ketidaksempurnaan dalam representasi demokratis. Seperti kekhawatiran yang di katakana oleh ilmuwan politik Gaetano Mosca yang menulis pada tahun 1896, berpendapat bahwa "setiap kelas menunjukkan kecenderungan untuk membangun dinasti politik secara turun-temurun, bahkan jika tidak di hukum" dan hal tersebut bahkan terbuka untuk semua kalangan yang memiliki posisi politik, ikatan keluarga dengan mereka yang sudah berkuasa akan memberikan berbagai keuntungan.²⁰

Ilmuwan politik lain seperti Michels, menulis tentang "hukum besi oligarki", menyatakan bahwa bahkan dalam organisasi demokratis, kepemimpinan, setelah terpilih, akan mengukuhkan dirinya dalam kekuasaan,

²⁰ Wasisto Raharjo Djati, "Revivalisme Kekuatan Familisme Dalam Demokrasi: Dinasti Politik Di Aras Lokal". *Jurnal Sosiologi Masyarakat*. Vol. 18, No. 2, Juli 2013, hlm. 208.

merusak prinsip demokrasi dari lapangan bermain yang setara.²¹ Namun kegigihan elit politik tidak serta merta menyiratkan bahwa kekuatan politik adalah milik sendiri. Mosca sendiri mempertimbangkan (dengan skeptis) argumen bahwa ketidaksetaraan yang terus-menerus dalam pencapaian politik mencerminkan ketidaksetaraan turun-temurun dalam bakat dan dorongan. Jika sifat-sifat seperti ini berjalan dalam keluarga, ini dapat menghasilkan keuntungan terus-menerus untuk beberapa keluarga karena mereka sudah menduduki posisi otoritas.

Studi kekuatan politik dinasti di AS terus berlangsung dengan sendirinya dan kehadiran dinasti politik tidak hanya mencerminkan perbedaan kemampuan antar keluarga tetapi juga mendefinisikan pengabdian diri sebagai efek perlakuan kekuasaan, di mana hal ini sangat diperlukan agar dapat memegang kekuasaan politik lebih lama dan mencapai kekuasaan politik di masa depan, untuk membuktikan hubungan kausal antara kekuatan politik dan kesuksesan dinasti berikutnya.

Studi dalam hal ini terdapat dua pendekatan variabel instrumental. Pendekatan pertama ialah menggunakan desain diskontinuitas regresi yang mengandalkan hasil pemilu tertutup sebagai instrumen untuk memperpanjang masa, dan untuk aplikasi pemilihan. Dari hasil penelitian menemukan bahwa legislator yang hampir tidak memenangkan pemilihan ulang pertama mereka memiliki pengaruh yang signifikan peluang lebih tinggi untuk memiliki kerabat yang masuk kongres di masa depan daripada legislator yang nyaris kalah dalam pemilihan

²¹ Ibid., hlm. 215.

ulang pertama mereka. Dalam pendekatan kedua, menentukan apakah pemilihan kembali pertama seorang legislator berhasil menggunakan tingkat pemilihan ulang sesama anggota legislatif partai di negara bagian yang sama dari tahun ke tahun.²²

Pendekatan variabel instrumental kedua menguatkan temuan tersebut. Secara keseluruhan, ditemukan bahwa memegang kekuasaan legislatif untuk lebih dari satu periode menggandakan kemungkinan bahwa seorang politisi akan memiliki kerabat memasuki kongres di masa depan. Karena guncangan eksogen ke kekuasaan dinasti memiliki efek pada kelanggengan dinasti, sifat-sifat tetap yang unggul (yaitu sumbangan asli dari keluarga, misalnya) tidak bisa menjadi penjelasan keseluruhan untuk dinasti politik di kongres AS. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam politik, kekuasaan melahirkan kekuasaan.

Politik dinasti (didefinisikan sebagai orang-orang dari keluarga yang sebelumnya menempatkan anggota sebagai orang dalam) kemungkinan memiliki pengalaman di dalam jabatan publik dalam instansi pemerintahan sebelumnya. Kemudian kemungkinan lain adalah bahwa masa kerja yang lebih lama memungkinkan elit politik untuk mengumpulkan aset yang kemudian dia wariskan untuk generasi kedepannya, seperti modal keuangan, manusia, jaringan atau kontak. Elit Politik dinasti lebih cenderung memilih dalam konteks lokal dimana tempat mereka dilahirkan. Ini menunjukkan bahwa politisi dinasti dapat mewarisi bentuk modal politik yang sangat berguna ditingkat lokal, seperti

²² Ernesto Dal Bo, Fedro Dal Bo and Jason Snyder, "Political Dynasties". Article The Review Of Economic Studies. 2009, hlm. 117.

koneksi politik lokal atau pengenalan nama yang bertentangan dengan bakat atau dorongan.²³

Secara umum, dinasti politik dapat di fahami sebagai salah satu strategi politik yang di pakai untuk tetap menjaga kekuasaan dengan cara mewariskan kekuasaan tersebut kepada orang yang masih tergolong kedalam status keluarga. Terdapat beberapa gejala yang mendasari terbentuknya sebuah dinasti yang dianalisis dari dua hal. Pertama, macetnya proses kaderisasi partai politik dalam memilih calon kepala daerah yang berkualitas, sehingga menghadirkan pragmatisme politik. Sehingga terjadi praktik mendorong kalangan sanak saudara terutama anggota keluarga yang kepala daerah jadikan sebagai orang yang terpenting yang lebih dahulu di rekrut atau diangkat untuk menjadi pejabat publik.²⁴

Kedua, dalam konteks masyarakat yang menjaga hadirnya kondisi status quo di daerah tertentu yang menginginkan kepala daerah untuk bisa berkuasa, dengan cara menggunakan kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah agar dapat menggantikan petahana. Kedua gejala umum tersebut menimbulkan adanya sikap pro dan kontra di dalam pemahaman praktik dinasti politik tersebut di satu sisi terdapat pihak yang menginginkan agar adanya pembatasan terkait dinasti

²³ Eriyanto. 2012. "Dinasti Politik dalam Pilkada: Menguntungkan atau Merugikan Kandidat? (Kasus Pilkada Kabupaten Kediri)". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Edisi 36, MIPI, Jakarta, hlm. 68.

²⁴ Djati, Wasisto Raharjo, "Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal". *Jurnal sosiologi masyarakat, LabSosio Universitas Indonesia*, Vol. 18. No 2., hlm. 179.

politik tersebut dengan cara membatasi sanak saudara dari kepala daerah untuk maju dalam pilkada. Sementara pihak lain mengusulkan bahwa dinasti politik tidak perlu dilarang hanya saja diperlukan sistem kaderisasi dari partai politik di daerah perlu difokuskan atau dibenahi.

Kajian ilmu sosial dan ilmu politik menjelaskan familisme merupakan suatu budaya politik yang dapat diartikan sebagai ketergantungan yang terlalu besar pada ikatan keluarga yang melahirkan kebiasaan menempatkan keluarga dan mengikat kekerabatan pada kedudukan yang lebih tinggi daripada kewajiban sosial lainnya dalam pengertian lain bahwa familisme juga dipahami sebagai new social order yakni dorongan psikologis bagi seseorang untuk dapat berkarir di dalam 2 ranah yakni dalam ranah publik sebagai birokrat dan dalam ranah privat sebagai korporat swasta.

Studi pada kasus eropa bahwa individualisme seseorang dalam ekspresi berpolitik tidak akan menjadi kuat jika tidak melibatkan sanak family didalamnya. Oleh karenanya, ekspresi berpolitik bukanlah untuk mengamankan kekuasaan, tetapi lebih mengarah pada artikulasi ide-ide dalam membangun masyarakat.

Oleh karenanya melalui jejaringan familisme ide-ide tersebut akan terjaga dan tersampaikan oleh anggota keluarga lainya yang berkecimpung dalam politik. Secara konseptual, preferensi politik famili sebenarnya lebih mengarah pada perilaku menjaga moral daripada mengejar kekuasaan. Dengan demikian orientasi terhadap menjaga kelanggengan kekuasaan tersebut sangatlah erat kaitanya dengan sifat naluri alamiah manusia untuk senantiasa menjaga zona kenyamanan

beserta fasilitas keamanan di dalamnya. Hal tersebut yang kemudian mendorong penguasa menjaga kekuasaan tetap harus terpusat dan tidak berpindah ke pihak lain melalui bermacam cara.

Konsep familisme di Amerika Utara/Eropa tidak sama seperti yang terjadi dalam kasus Negara-negara dunia ketiga. Familisme dimaknai sebagai usaha untuk menyuburkan sikap favoritis, nepotisme, seksionalisme, maupun regionalism. Hal tersebut dilandasi hadirnya semangat bersama untuk menjaga dan mewujudkan kepentingan secara kolektif. Namun demikian, derajat ketergantungan dalam familisme sendiri juga saling berdiferensiasi bergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Artinya, hubungan darah (*consanguinity*) tidaklah menjadi patokan mendasar bagi seseorang untuk mendorong sanak keluarga dalam ranah politik.²⁵

Terdapat tiga varian familisme dalam membicarakan dinasti politik dalam konteks ini. Pertama adalah familisme (*familism*), yaitu politik dinasti yang didasarkan secara murni pada hubungan darah langsung dalam keluarga inti (*consanguinity*) dan hubungan perkawinan (*marriage*) dengan klan lainnya.

²⁵Garzon Adela, " Cultural Changeand Familism." *Jurnal Psicothema*. Vol. 12, No. 1, 2000, hlm. 46.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, kepercayaan orang yang akan diteliti dan kesemuanya yang tidak dapat diukur dengan angka. Pendekatan kualitatif suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.²⁶

3.2 Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu: Relasi perempuan pada jabatan publik di pemerintah Kota Subulussalam.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Subulussalam kecamatan simpang kiri. Karena disana terdapat masalahnya, dimana terjadi penambahan posisi perempuan sebagai pejabat publik di ranah pemerintahan Kota Subulussalam. Kemudian keterjangkaun lokasi penelitian oleh peneliti, baik dilihat dari segi tenaga, dana, maupun dari segi efesiensi waktu dan kemudahan akses. Pelaksanaan studi di lokasi yang dipilih tidak menimbulkan masalah dalam

²⁶Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 47.

kaitanya dengan kemampuan peneliti, pemilihan lokasi penelitian ini dapat memberikan efisiensi waktu dan masih dapat melaksanakan penelitian dikarenakan lokasi penelitian merupakan daerah asal peneliti.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara meneliti langsung ke lapangan atau hasil wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian ini seperti Walikota, Pejabat Pemerintahan, dan Masyarakat.

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian ini terdiri dari Walikota Subulussalam, Camat Simpang Kiri, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan KB, Kepala Puskesmas Simpang Kiri dan Direktur Umum Rumah Sakit Ibu dan Anak.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama Informan	Unsur	Jumlah
1.	H. Affan Alfian Bintang	Walikota Subulussalam	1
2.	Rahmayani S.STP	Camat Simpang Kiri	1
3.	Nurul Akmal	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan KB.	1
4.	Munawarroh	Kepala Dinas Kesehatan	1
5.	Yusmaniar	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1
6	Isrianti	Kepala Puskesmas Simpang Kiri	1
7	dr. Dewi Sartika Pinem	Direktur Umum Rumah Sakit Daerah - Ibu dan Anak Kota Subulussalam.	1

8	Masyarakat	Pegawai Kontrak dan Non Pegawai Kontrak	4
---	------------	---	---

Informan ini terdiri dari 6 perempuan yang memiliki posisi pada jabatan public di pemerintah kota subulussalam, 4 masyarakat yang terdiri dari 2 unsur yang berasal dari pemerintahan dan non pemerintahan, dan 1 orang terdiri dari walikota Subulussalam selaku kepala daerah yang memberi jabatan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa metode data, antara lain:

3.6.1 Wawancara

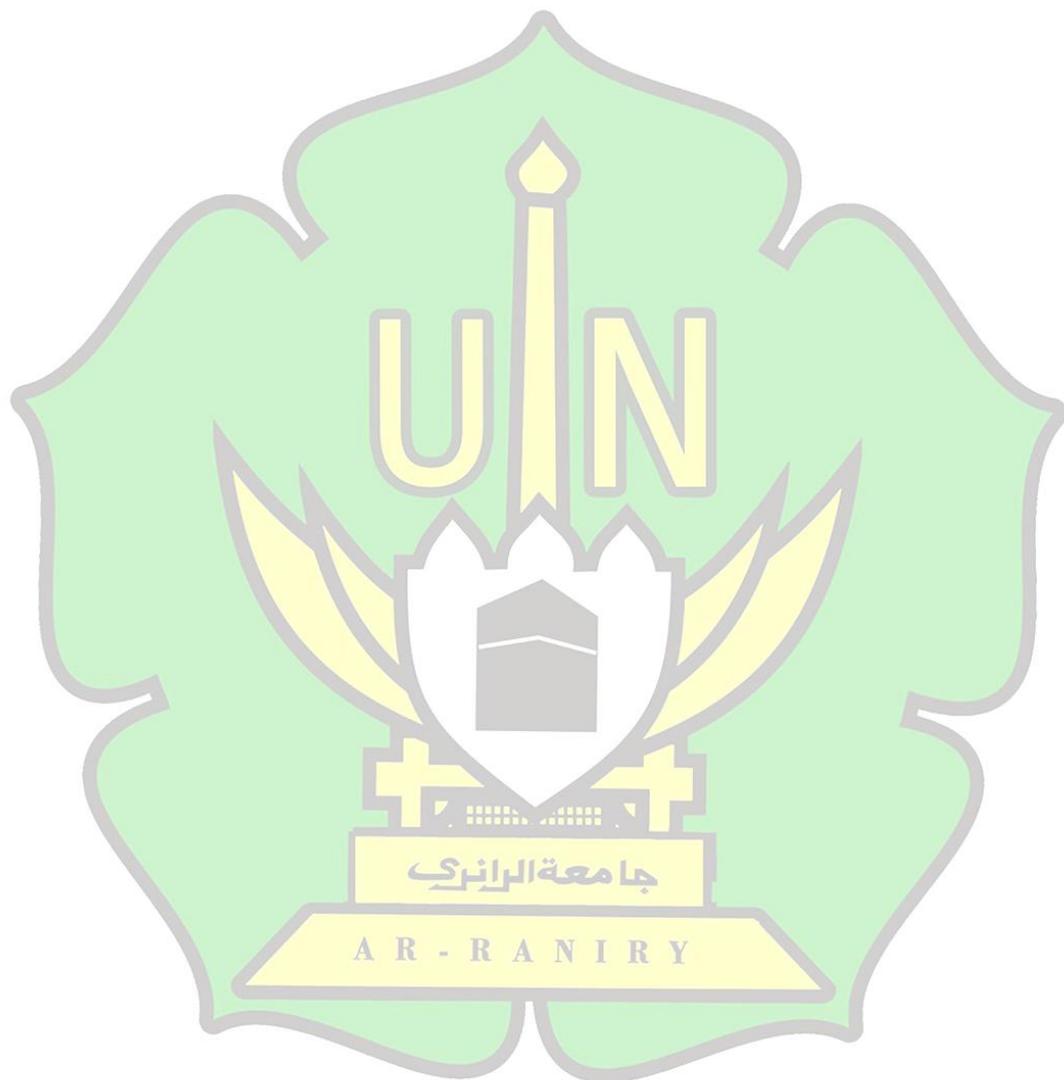
Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi dan petunjuk dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian. Jenis wawancara yang digunakan dalam wawancara ini adalah wawancara tak terstruktur atau sering juga disebut dengan wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif dan wawancara terbuka.

3.6.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan bentuk dokumen yang relevan dengan tema penelitian. Misalnya dengan mealukan penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, kebudayaan, laporan, notulen rapat, media sosial, surat kabar online dan dokumentasi lainnya yang relevan dengan tema penelitian.

3.7 Teknik pemeriksaan dan keabsahan data

Untuk menilai apakah data-data yang diperoleh itu sudah valid maka perlu digunakan teknik triangulasi proses pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Potret Perempuan Pada Posisi Publik di Kota Subulussalam

Posisi perempuan pada pemerintah kota Subulussalam telah berubah secara dramatis dalam 15 tahun terakhir. Proporsi perempuan yang masuk perguruan tinggi, lulus dari sekolah pascasarjana dan memperoleh gelar doktor telah mengalami peningkatan. Menurut data dari badan pusat statistik kota Subulussalam bahwa jumlah tingkat pendidikan berdasarkan jenis kelamin (perempuan) terus menerus mengalami peningkatan. Bila ditinjau berdasarkan angka tingkat pendidikan tahun 2020 perbandingan jumlah angka perbandingan pendidikan antara laki laki dan perempuan berjumlah, laki-laki sebanyak 69 dan perempuan sebanyak 244 berdasarkan lulusan diploma III. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan sarjana/ doktor menurut jenis kelamin, laki-laki sebanyak 735 dan perempuan sebanyak 771.

Hal ini menunjukkan bahwa perbandingan tingkat pendidikan perempuan dan laki-laki di kota Subulussalam terdapat perbandingan. Pendidikan ternyata menjadi alasan bagaimana perempuan membangun relasi sebagai power untuk dapat naik dan mendapatkan posisi dan jabatan publik di kota Subulussalam. Peningkatan posisi perempuan sebagai pejabat di pemerintah Kota Subulussalam sebanyak 6 orang. Diantaranya kepala dinas kesehatan, dinas transmigrasi dan pekerjaan umum, dinas pemberdayaan perempuan, kepala puskesmas, direktur utama rumah sakit ibu dan anak, serta camat simpang kiri. Subulussalam merupakan daerah yang juga mengalami proses modernisasi pendidikan,

pemikiran dan tren baru dalam memandang perempuan sebagai makhluk yang boleh bergabung dalam urusan publik. Terdapat contoh proses rasionalisasi dalam banyak aspek kehidupan. Contohnya dari aspek hubungan sosial yang semakin pragmatis bukan lagi emosional. Pergeseran kearah yang lebih modern ini kemudian memberikan dampak kepada cara berfikir baru yang hadir tentang relasi gender dan bagaimana tantangan bagi perempuan yang menjadi objek terkait gender.

4.1.1 Perempuan di posisi publik secara umum

Tingkat keterwakilan perempuan dalam lembaga politik formal baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan perempuan. Hal ini disebabkan karena kehidupan perempuan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan publik yang dibuat oleh lembaga politik formal. Kondisi yang demikian itu sangat ditentukan oleh siapa yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, perspektif apa yang mereka gunakan serta ideologi apa yang tersembunyi dibalik pembuatan kebijakan publik yang diberlakukan tersebut. Maka dari itu perlu kajian yang mendalam terkait posisi perempuan dalam partisipasi dan keterwakilan dalam politik dan kebijakan di era otonomi daerah dewasa ini.

Secara umum peranan perempuan dalam mengambil keputusan di kota Subulussalam sudah memperlihatkan perkembangan yang semakin membaik. Bila di tinjau dari tahun 2007 dimana pembentukan kota

Subulussalam untuk pertama kalinya dan Subulussalam resmi disebut sebagai sebuah kota, dan saat itu posisi perempuan tidak ada. Kemudian kota Subulussalam melangsungkan Pilkada tahun 2013 dan posisi perempuan terisi satu sebagai kepala dinas pemuda dan olahraga, kepala dinas tersebut merupakan istri dari walikota yang menjabat saat itu yaitu Meurah Sakti. Pilkada ketiga dilangsungkan tahun 2018 dan posisi perempuan mengalami penambahan dalam jabatan publik sebanyak 6 orang.

Bila ditinjau dari kursi perwakilan rakyat yang duduk pada lembaga legislative di kota Subulussalam. Posisi perempuan pada kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam di tahun 2008 terdapat satu posisi dari partai Golkar dan berhasil mendapatkan jabatan sebagai wakil ketua DPRK pada tahun tersebut. Kemudian, pada tahun 2011 ketua DPRK kota Subulussalam dijabat oleh perempuan untuk pertamakalinya yang berasal dari partai PKP.

Jumlah wakil rakyat yang duduk pada lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Subulussalam pada tahun 2020 yaitu sebanyak 20 orang. Jika ditinjau berdasarkan komposisi keanggotaan partai politik, dimana pada tahun 2018 terdapat lima partai politik yang jumlahnya sama, yaitu Partai Aceh, Golkar, Hanura, PAN, dan PKB. Masing-masing partai politik tersebut mendapatkan 15% kursi sedangkan pada tahun 2020 jumlah kursi terbanyak didapatkan oleh Partai Hanura yaitu 20% kursi. Bila ditinjau berdasarkan jenis kelamin, jumlah

anggota DPRD Kota Subulussalam dari golongan laki-laki sebanyak 17 orang dan perempuan sebanyak 03 orang.

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa dari 20 jumlah anggota DPRD Kota Subulussalam terdapat 03 keterwakilan perempuan yang menjadi anggota didalam lembaga legislatif. Untuk melihat lebih rinci, akan digambarkan dalam table berikut ini:

Tabel.4.1 Jumlah Anggota DPRD Kota Subulussalam

Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Partai Hanura	3	1	4
Partai Golkar	3	-	3
PAN	2	1	3
Partai Aceh	1	1	2
PNA	2	-	2
Demokrat	2	-	2
Gerindra	1	-	1
PKPI	1	-	1
PBB	1	-	1
PKS	1	-	1
Jumlah/ Total	17	3	20

Berdasarkan data diatas, dapat di fahami bahwa potret perempuan

secara umum di kota subulussalam terus mengalami peningkatan yang baik, mulai dari perempuan yang mendapatkan posisi sebagai pejabat publik yang setiap paska pilkada dari tahun 2007 yang pada awalnya posisi perempuan tidak ada, kemudian ditahun 2013 terisis satu hingga pada tahun 2019 terisi sampai 6 dan mengalami penambahan posisi, hingga perempuan yang mendapatkan posisi didalam kursi DPRK, ditahun 2011 posisi ketua DPRK berhasil direbut oleh perempuan dan bahkan setiap paska pemilu sampai tahun 2020 posisi perempuan tetap terisi sebanyak 3 kursi di kota Subulussalam.

4.1.2 Perempuan di Posisi Eksekutif

Posisi strategis yang didapatkan oleh perempuan dalam ranah eksekutif di Kota Subulussalam sudah sangat terlihat jelas, para perempuan sudah sangat berperan aktif dalam mendapatkan jabatan publik di ranah pemerintahan eksekutif Kota Subulussalam serta sudah mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Hal tersebut menjadi nilai positif yang memperlihatkan bahwa perempuan sejatinya memiliki profesionalisme dalam bekerja dan bisa bertanggung jawab didalam pekerjaan tersebut.

Seiring berkembangnya zaman, perempuan mulai memperlihatkan bakatnya dengan percaya diri tampil di ranah publik. Dan akhirnya kinerja perempuan bisa dinilai lebih bagus daripada laki-laki. Terlihat bahwa pasca dilangsungkanya pemilihan kepala daerah dari tahun ke tahun, terlihat bahwa posisi strategis di ranah pemerintahan kota Subulussalam

mengalami perubahan, dimana pada umumnya posisi strategis hanya menjadi domain laik-laki, namun sekarang posisi tersebut bisa didapatkan oleh perempuan di Kota Subulussalam. Posisi staregis yang didapatkan oleh perempuan di ranah eksekutif Kota Subulussalam diantaranya ialah:

Dinas kesehatan. Dinas Kesehatan merupakan instansi pemerintah daerah Kota Subulussalam yang membidangi kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah. Pejabat perempuan yang mendapatkan posisi strategis sebagai kepala dinas kesehatan di kota subulussalam saat ini ialah, Munawarroh.

Munawaroh sebelumnya menjabat sebagai kepala seksi farmasi dan akreditasi dinas kesehatan di tahun 2008-2009, kemudian menjabat sebagai kepala bidang jaminan dan sarana kesehatan ditahun 2014-2019 dan menjadi apoteker ahli madya di puskesmas penanggalan ditahun 2019, kemudian menjadi kepala dinas kesehatan ditahun 2020-sekarang. Sebagaimana yang disampaikan oleh seoran informan penelitian dalam penelitian ini “ADP: kepala dinas kesehatan itu sebelumnya mashuri, setelah mashuri baru bu muna, bu muna itu sebelumnya kerja di puskesmas penanggalan”.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Dinas ini memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah Kota Subulussalam

yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidangnya, dinas ini juga berfungsi merumuskan kebijakan teknis dibidang tenaga kerja dan transmigrasi dan penyelenggaraan pelayanan umum dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. Kepala dinas transmigrasi kota subulussalam saat ini merupakan kepala dinas perempuan pertama yaitu Yusmaniar, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi “ kepala disnaker kata orang ni baru saya juga yang pertama, sebelumnya ada pak Adri, habis pak Adri, pak Asrul, habis pak Asrul baru saya”. Wawancara tersebut menjelaskan bahwa pejabat maupun kepala dinas tenaga kerja daerah kota subulussalam periode 2018-2023 di duduki oleh perempuan untuk pertamakalinya.

Dinas pemberdayaan perempuan dan anak merupakan dinas yang mempunyai tugas membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan keluarga berencana. Kemudian menjalankan apa yang ditugaskan oleh kepala daerah. Kepala dinas merupakan pimpinan tertinggi didalam instansi tersebut, kepala dinas pemberdayaan perempuan, anak dan KB. Saat ini pejabat instansi tersebut merupakan perempuan yaitu Nurul Akmal, sebelumnya jabatan tersebut di jabat oleh Dr. Akmal Jawardi, sementara Nurul Akmal sebelumnya bekerja sebagai Staff di dinas BAPEDA Kota Subulussalam. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan dalam penelitian ini “DIA: sebelum bu Nurul itu ada Pak Akmal Jawardi, terus setelah bapak itu, baru bu Nurul,

Sebelumnya Bu Nurul itu kerja di dinas BAPEDA sebagai Staf dia”

Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kota atau kabupaten. Camat diangkat dan dipilih oleh walikota berdasarkan pertimbangan dan *track record* yang dimiliki oleh seorang camat. Kota subulussalam pada tanggal 29 November 2019 lalu digemparkan oleh hadirnya berita bahwa walikota mengangkat camat perempuan untuk pertamakalinya dalam sejarah kota Subulussalam. Camat tersebut ialah Rahmayani, dimana sebelumnya camat simpang kiri di jabat oleh Jhoni Arizal, dan Rahmayani sebelumnya menjabat sebagai sekretaris majelis pendidikan daerah, namun saat ini jabatan mereka tertukar dimana, Jhoni Arizal saat ini menjabat sebagai sekretaris majelis pendidikan daerah.

Puskesmas merupakan instansi pemerintahan yang memfasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Puskesmas simpang kiri saat merupakan puskesmas induk yang berada di kecamatan simpang kiri yang membawahi pusat kesehatan desa (PUSKESDES), tentunya puskesmas dituntut harus lebih teliti terhadap puskesmas-puskesmas yang ada didesa dan sanggup untuk mengontrol setiap puskesdes tersebut.

Kepala puskesmas simpang kiri saat ini dikepalai oleh seorang perempuan yaitu Isrianti yang juga menjabat sebagai ketua Bhayangkari kota subulussalam. Sebelumnya isrianti juga menjadi staff di dalam

puskesmas simpang kiri tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang responden dalam penelitian ini yaitu, “EYC: Sebelumnya bu Isri itu bertugas sebagai kepala ruangan imunisasi di puskesmas simpang kiri ini juga”.

Rumah sakit umum daerah adalah institusi pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah kota subulussalam. Pelayanan yang diberikan rumah sakit dituntut untuk selalu melakukan perubahan, agar pelayanan itu dapat sesuai dengan harapan dan kebutuhan pelanggan yaitu masyarakat. Rumah sakit umum daerah kota subulussalam di pimpin oleh seorang direktur. Direktur umum rumah sakit ibu dan anak daerah kota subulussalam saat ini ialah dr. Dewi Sartika Pinem, dimana pejabat perempuan tersebut menjadi pejabat atau direktur umum pertama perempuan di kota subulussalam. Sebelumnya posisi direktur sejak dulu selalu menjadi domain laki-laki, namun saat ini posisi tersebut mampu direbut oleh perempuan di Kota Subulussalam.

Sebagaimana yang disampaikan oleh responden dalam penelitian ini yaitu “IWS: sebelumnya dokter Dewi itu jabatannya sebagai kabid, direktornya waktu itu masih dokter Ipin, sekarang dokter Ipin udah pindah lagi ke puskesmas penanggalan”.

4.2 Relasi dan Daya Tawar Perempuan Sebagai Pejabat Publik

Makna relasi menurut KBBI yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa relasi yang memiliki artian hubungan, perhubungan, pertalian, pelayanan dan pelanggan, seolah menjadi kekuatan dan point untuk perempuan dalam mendaoatkan posisi sebagai pejabat publik. Seperti apa yang telah dijelaskan oleh Foucault bahwa relasi merupakan kekuasaan (*power*) yang dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan. Hadirnya relasi dalam kehidupan sehari-hari pada akhirnya menjadi kebiasaan bahwa mereka yang hidup dalam kelas atas seolah memisahkan diri dari mereka yang hidup dalam kelompok kelas bawah.

Kekuasaan pada akhirnya mutlak dipegang oleh kelompok kelas atas dengan jaringan yang dimiliki. Tidak lagi dapat dipungkiri bahwa untuk menjaga klan politik agar tetap berada pada kondisi yang stabil maka para penguasa menggunakan berbagai cara terutama menggunakan praktik dinasti politik didalamnya kemudian relasi menjadi sumber kekuatan dalam mendapatkan kekuasaan. Oleh karenanya relasi menjadi nilai tawar untuk mendapatkan kekuasaan baik berupa jabatan dan lain sebagainya.

Relasi hadir dan memiliki kaitan dengan politik dinasti, dalam studi kasus kota Subulussalam. Politik dinasti yang memiliki artian bahwa politik dinasti merupakan proses mengarahkan regenerasi kekuasaan terhadap kepentingan golongan tertentu (kelompok elit, bangsawan, dan kaum teratas) yang memiliki tujuan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Dinasti politik merupakan lawan bagi demokrasi karena demokrasilah rakyat bebas memilih pemimpin yang dianggapnya sebagai jargon.

Menurut Marcus Mietzner dalam tulisanya yang berjudul *indonesia's 2009 elections* menganggap bahwa politik dinasti cenderung kuat dalam politik kontemporer Indonesia. Prakti politik dinasti dianggap tidak sehat bagi demokrasi Indonesia, karena control terhadap pemerintah yang diperlukan dalam demokrasi, misalnya *checks and balances* menjadi lemah. Dinasti politik dalam dunia politik dewasa ini dikenal sebagai pengamat politik yang disebut sebagai politik oligarki. Terkhusus dalam konteks Indonesia, kelompok elit merupakan kelompok yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik, sehingga mereka relatif mmudah menjangkau kekuasaan atu bertarung memperebutkan kekuasaan. Kuatnya jaringan politik dinasti yang terbangun karena kedekatan politik keluarga sehingga menyebabkan tertutupnya rekrutmen politik bagi orang-orang yang tidak termasuk kedalam ruang lingkup dinasti (orang luar).²⁷

Studi pada tingkat lokal, adakalnya demokrasi hadir khusus memfokuskan pada institusi pemerintahan saja. Seperti yang disampaikan oleh Ted Robert Gurr yang menekankan keberadaan institusi eksekutif. Menurutnya demokrasi mengandung empat unsur, diantaranya ialah 1) persaingan rekrutmen politik, 2) tantangan yang dihadapi oleh eksekutif, 3) persaingan partisipasi politik, dan 4) keterbukaan rekrutmen eksekutif. Hal ini kemudian menjadi paradigma berfikir para elit politik lokal yang hanya focus pada bagaimana mempertahankan posisi atau kedudukan sebagai eksekutif. Munculnya fenomena dinasti politik akan

²⁷ Martien Herna Susanti, "Dinasti Politik Dalam Pilkada Di Idonesia". *Jurnal of Government and Civil Society*. Vol. 1, No.2, 2017, hlm. 112.

mengancam fase transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi. Unsur yang terlibat dalam konsolidasi demokrasi adalah lembaga atau institusi politik, baik partai politik, elit politik, maupun kelompok kepentingan dan masyarakat.

Pada studi Kota Subulussalam, setelah dilakukan penelitian terdapat beberapa relasi dan daya tawar yang berkaitan dengan dinasti politik dimana beberapa perempuan yang mendapatkan posisi staretgis dalam lembaga pemerintahan kota Subulussalam ternyata didukung oleh hadirnya relasi kekeluargaan, hubungan pertalian darah dan pernikahan, semarga dan satu suku. Sehingga hal ini menjadi pertimbangan bagi kepala daerah dalam penempatan posisi perempuan dalam mendapatkan posisi sebagai pejabat publik.

a. Hubungan walikota dengan pejabat

Paska pemilihan kepala daerah dilaksanakan pada tahun 2018 dan walikota terpilih mulai menjalankan kekuasaan dan jabatannya, maka muncul Mutasi besar-besaran, dimana walikota selaku pemerintah daerah memiliki hak prerogatif sebagai seorang pejabat politisi di Kota Subulussalam. Posisi penting dibagi-bagikan kepada para kerabat semarga dan sekampung (asal daerah). Birokrat atau pejabat yang tidak memiliki hubungan khusus tidak akan bisa menempati jabatan strategis, dan kemungkinan sangat kecil untuk di promosikan. Saudara atau adik ipar walikota subulussalam memiliki jabatan sebagai kepala dinas kesehata, ia merupakan istri dari adik walikota subulussalam.

Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang responden yaitu kepala dinas kesehatan.²⁸

“Strategi dan daya tawar yang saya berikan sebenarnya itu semuanya dibarengi dengan kriteria, disamping saya juga mampu karena pangkat dan golongan saya dan latar belakang pendidikan saya yang juga dari ranah kesehatan. Kemudian tidak bisa di bohongi kalau misalnya jalinan kekeluargaan itu yang menentukan, entah misalnya walikota itu adalah abang saya, atau misalnya kakek saya kan pasti akan berpengaruh untuk memudahkan kita mendapatkan jabatan termasuk saya ya kan?, kan saya bisa duduk disini Karena saya kan memang ada hubungan dengan abang ipar saya yaitu pak bintang. Saya mau duduk disini bukan semata karena adanya hubungan keluarga,tetapi karena saya memang layak karena didukung oleh pangkat dan golongan, saya sudah IVb saya sudah S2 seandainya tidak ada dukungan dari hal ini semua mungkin saya enggak akan mau ditunjuk untuk duduk disini. Kemudian pengalaman kerja saya juga sudah pernah menjadi Kasi dan Kabid di dinas kesehatan ini, dan saya punya anggota dan saya juga memotivasi anggota saya dan saya rasa ini menjadi alasan sehingga saya cocok untuk duduk disini.”²⁹

Hasil wawancara dengan responden tersebut diatas, dapat difahami bahwa kriteria untuk menjadi seorang birokrat yang memiliki jabatan ternyata tidak jauh dari hadirnya hubungan kekerabatan antara walikota selaku kepala daerah. Latar belakang kekerabatan nyatanya juga menjadi nilai tambah bahwa untuk menjadi seorang kepala dinas, tentunya memerlukan *the power of* orang dalam atau *people in*. Tidak lagi bisa dipungkiri bahwa dalam lingkaran birokrat tentunya orang yang terdekatlah yang harus di rangkul terlebih dahulu. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

²⁸Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinton, *Politik Lokal di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 491.

²⁹ Wawancara dengan Munawaroh, Kepala Dinas Kesehatan, Pada Tanggal 14 februari 2021 di Kota Subulussalam.

“Saya menjadi kepala dinas sebenarnya saya ndak ambisi untuk mendapatkannya, cuman menurut pimpinan ketika ditunjuk ASN harus siap menerima, pokoknya kita harus sesuai dengan pangkat, golongan dan ilmu kita. Saya juga aktif di organisasi kebetulan saya seketaris di PKK kota makanya saya selalu dampingin bu Walikota sebagai ketua PKKnya, sayakan dekat dengan bu wali dan seorganisasi dengan beliau, kemudian anak saya juga kemarin ada bantu-bantu juga waktu pemilihan si fadli ketua DPRK anaknya pak wali kan, makanya selain dekat dengan istrinya anak saya juga dekat dengan anaknya, kemudian suami saya juga semarga orang itu kan sama pak bintang, sa/ya pernah merasakan imbas waktu pak bintang enggak menang di pilkada 2013 saya dipindahkan jauh ke sultan daulat, dan ketika pak bintang menang di pilkada 2018 saya ditarik lagi.”³⁰

Hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa ternyata untuk mendapatkan jabatan publik nyatanya tidak melulu bicara soal daya tawar, karena dengan adanya jalinan hubungan juga menjadi faktor pendukung untuk mendapatkan jabatan publik. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang responden “ibu itukan sodara dengan pak bintang, dia itu kalo nggak salah kakak iparnya pak bintang, suaminya itu abangnya pak bintang”.

b. Hubungan walikota dengan kelompok elit

Cara utama politisi mentransfer sumber daya ke klien mereka adalah melalui janji pribadi kepada pemimpin lokal atau (pejabat, pimpinan, kelompok elit) untuk menjaga ritme politiknya. Hal utama yang dapat dilakukan politisi tingkat tinggi ini adalah menjalin ikatan dengan para politisi tingkat birokrat, di mana interaksi dijalin sebugus mungkin antara politisi dan birokrat. Jenis hubungan khusus, yang harus diamati oleh aktor politik (Kepala Daerah) adalah untuk membangun hubungan atau memelihara ritme politiknya. Permasalahan

³⁰ Wawancara dengan Yusmaniar, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pada tanggal 01 maret 2021 di Kota Subulussalam.

yang sering terjadi dalam ranah pemerintahan, bahwa Kepala daerah membutuhkan pihak elit khusus seperti penegak hukum untuk menjaga posisinya agar tetap aman dan jauh dari isu non-positif, untuk menjalin buhungan tersebut maka dibutuhkan pendekatan dengan orang terdekat elit atau penegak hukum tersebut. Seperti apa yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas Simpang Kiri

“Saya ditunjuk sebagai kepala puskesmas simpang kiri itu saya juga enggak tau, tiba-tiba saya di telfon dan saya di panggil ke pendopo. Sayakan sudah lama ya bekerja di puskesmas ini dan ketika diamanahkan sebagai kepala puskesmas ya saya siap dan saya jalankan. Saya juga ada pegang beberapa organisasi kayak di bhayangkari karena kebetulan suami sayakan kerja di kapolres subulussalam dan punya jabatan sebagai Kepala Satuan Intel (KASAT INTEL) dan saya dibantu oleh beliau juga.”³¹

Hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa keterlibatan laki-laki (suami) juga menjadi faktor pendukung (daya tawar) bagaimana kemudian perempuan di Subulussalam mendapatkan jabatan publik. jabatan laki-laki (suami) tentunya menjadi pertimbangan bagi kepala daerah untuk menjalin hubungan baik. Terlebih dengan jabatan di bidang kepolisian selaku Kasat Intel Polres Kota Subulussalam.

c. Profesionalisme perempuan di ranah publik

Perempuan yang bekerja sebagai pejabat publik harus bisa melihat bagaimana peran mereka didalam pemerintahan, menjalankan roda pemerintahan secara sungguh-sungguh tanpa ada tekanan dari pihak manapun sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik. Tugas dan wewenang wanita sebagai pejabat

³¹Wawancara dengan Isrianti, Kepala Puskesmas Simpang Kiri, pada tanggal 12 Maret 2021 di Kota Subulussalam.

publik adalah menjalankan semua aktivitas yang berhubungan dengan publik dan menerima laporan dari masyarakat mengenai tata cara system pemerintahan. Wanita dituntut untuk bisa menjalankan semua urusan dan mengurus segala hal yang menyangkut masalah publik. Seorang pejabat publik dilingkungan pemerintah harus bisa menunjukkan bahwa ia bisa melaksanakan semua tugas yang diberikan kepadanya dan menjalankannya dengan baik sehingga orang menilai bahwa mereka ditunjuk untuk menduduki suatu jabatan sesuai dengan keahliannya, seperti yang disampaikan oleh Camat Simpang Kiri Kota Subulussalam.

“Strategi dan daya tawar yang saya berikan saat itu ialah yang pertama karena basik saya di pemerintahan, sekolah IPDN itu kan banyak Fositifnya. Daya tawar yang saya berikan kepada kepala daerah kita saat itu saya rasa murni dari kepribadian saya, saya siap diperintahkan apa saja, saya tidak peduli walaupun saya perempuan saya merasa selagi saya mampu akan saya laksanakan, ketika ada tugas mendadak saya selalu hadapi dan kerjakan, ketika ada tugas di luar misalnya seperti kebakaran di kecamatan sultan daulat saya subuh-subuh memberanikan diri untuk menyetir mobil sendiri dan langsung terjun ke lokasi kebakaran. Dan saya rasa dengan inilah orang-orang menilai saya termasuk juga pemimpin kita bahwa saya sanggup untuk diberikan jabatan sebagai camat di simpang kiri walaupun saya perempuan.”³²

Hal Senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB.

“Sebenarnya untuk mendapatkan jabatan itu enggak ada saya, apa lagi kalo masalah uang atau beli-beli jabatan, itu enggak mungkin. Cuman, saya itu orangnya aktif, perempuan mana yang udah pernah sampek di sidang PBB, saya sudah pernah hadir di siding PBB, perempuan yang aktif organisasi di tingkat lokal dan nasional, bahkan internasional. Mungkin dari sinilah

³²Wawancara dengan Rahmayani Munthe, Camat Simpang Kiri, pada tanggal 24 Februari 2021 di Kota Subulussalam.

orang-orang menilai kinerja saya, apalagi walikota kita sekarang inikan orangnya baik, ya mungki itu aja”.³³

Berdasarkan wawancara diatas dapat di fahami bahwa strategi yang diberikan oleh Rahmayani selaku camat pertama perempuan di Kota Subulussalam, dan Nurul Akmal. Bahwa sebenarnya untuk mendapatkan jabatan publik tentunya harus memiliki sumber daya yang cukup untuk mengemban amanah. Kemudian, latar belakang pendidikan dan pengalaman bekerja juga mempengaruhi agar mudah mendapatkan jabatan publik. Kemudian profesionalitas, kepribadian yang berani dan menerima segala apa yang diperintahkan juga sangat penting. Sebagaimana yang disampaikan oleh Walikota Subulussalam.

“Masa 2013 saya maju sebagai walikota dan mengangkat harkat seorang gender sebagai pasangan saya yang saat itu mantan ketua DPRK perempuan yaitu Pianti Mala dari situ awalnya saya sebenarnya punya keinginan untuk mengangkat kaum wanita agar wanita tidak dipandang sebelah mata dengan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya, dan orasi-orasi politik saya selalu perempuan-perempuan agar terangkat namun angan-angan itu belum terjadi karena saya belum terpilih. Jadi sekarang masa-masa kepemimpinan saya ini mengevaluasi kalau memang ada kemampuannya tidak salahnya untuk mengangkat kabinet-kabinet saya itu perempuan yang sesuai dengan kemampuannya, pangkatnya dan sesuai dengan teknik dan jurusannya, dan Alhamdulillah dimasa kepemimpinan saya itu perempuan-perempuan itu bisa. Saya sering berkolaborasi dengan perempuan-perempuan itu dan saya melihat semangat perempuan-perempuan itu, dan saya juga memanfaatkan kuota gender dan memasukkan relasi gender di pemerintahan saya. Dan saya lihat sejauh ini Alhamdulillah perempuan itu bisa-bisa aja, contohnya

³³ Wawancara dengan Nurul Akmal, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB, pada tanggal 24 Februari 2021 di Kota Subulussalam.

saya angkat camat perempuan dan dia bisa bahkan mengalahkan laki-laki dan tidak ada perempuan itu yang cengeng.”³⁴

Kemudian walikota subulussalam juga mengatakan bahwa ia belajar dari daerah lain yang melibatkan perempuan dalam ranah publik, dan ia merasa bahwa profesionalisme perempuan itu memang berbeda dengan laki-laki, seperti apa yang iya sampaikan.

“Bertambahnya jumlah atau posisi perempuan di Kota Subulussalam memang menjadi hal baru. Kemudian saya juga banyak belajar dari Daerah lain seperti provinsi Sumatra utara yang melibatkan perempuan dalam jabatan publik, dan hasilnya ketika saya terpilih sebagai Walikota paska pilkada 2018 dan saya mencoba untuk mengambil perempuan sebagai kabinet kerja saya dan saat ini ternyata perempuan-perempuan ini mampu dan bisa menjadi pejabat publik, contohnya Camat Simpang Kiri saat ini, kinerjanya bahkan lebih bagus daripada Camat laki-laki begitu pula dengan pejabat perempuan lainnya”.³⁵

4.3 Tantangan Perempuan Dalam Mendapatkan Posisi Sebagai Pejabat Publik

Dalam kenyataannya tidak mudah bagi perempuan dalam mendapatkan jabatan publik, terutama di Kota Subulussalam. Karena selama ini hadirnya stereotipe banyak individu yang beramsusi bahwa wanita sejatinya sudah memiliki peran domestik (khusus) yakni bekerja di sumur, dapur, dan kasur sehingga peran publik tidak cocok untuk digeluti oleh perempuan, dan ranah publik lebih cocok jika diperankan oleh laki-laki saja. Kemudian hadirnya modernisasi dalam pusaran masyarakat Kota Subulussalam menjadikan pemikiran-pemikiran negatif itu mulai memudar, namun tidak menutupi kemungkinan bahwa perempuan yang

³⁴Wawancara dengan H.Affan Alfian Bintang, Walikota Subulussalam, Pada Tanggal 03 Maret 2021, di Kota Subulussalam

³⁵ Ibid., Tanggal 03 Maret 2021.

mendapatkan jabatan di sektor publik atau di lembaga pemerintahan Kota Subulussalam mendapatkan tantangan.

Terdapat tantangan atau hambatan tersebut tetap didapatkan oleh perempuan yang bekerja sebagai pejabat publik, diantaranya. a) Nilai Patriarki, b) Keseimbangan Pekerjaan dan Keluarga, c) Peran Sosial, d) Pengaruh Aktivitas, e) Komunikasi (internal Networking).

a. Nilai patriarki

Hadirnya nilai patriarki dalam pemikiran masyarakat awam Subulussalam yang menganggap bahwa keterlibatan perempuan dalam sektor publik masih menjadi hal yang tabu. Ketidakcocokan perempuan menjadi seorang pemimpin seolah menghidupkan anti-kesetaraan gender, dan membawa isu agama. Dalam artian bahwa masyarakat umum belum bisa sepenuhnya menerima kehadiran gender dalam ruang publik. Hadirnya pejabat perempuan dalam ranah pemerintahan tentunya masih mendapatkan diskriminasi gender dan menghidupkan stereotip budaya patriarki. Sebagaimana tanggapan yang dijelaskan oleh informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Kesehatan.

“Kalau tantangan masalah budaya patriarki ada saya dapatkan, dan itu dari orang internal saya, ada kabar dia bilang begini “masak pimpinan perempuan” dan merasa saya enggak pantas duduk disini sebagai pejabat”.³⁶ Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa kata-kata diskriminasi yang mengarah kepada nilai patriarki terhadap perempuan yang memiliki

³⁶Wawancara dengan Munawaroh, Kepala Dinas Kesehatan, Pada Tanggal 14 februari 2021 di Kota Subulussalam

jabatan, masih menjadi tantangan bagi perempuan yang memiliki jabatan di sektor publik”.

Dari hasil wawancara diatas terdapat temuan bahwa perjalanan perempuan yang mendapatkan posisi dalam ranah publik masih dihantui oleh hadirnya patriarki. Khususnya di Kota Subulussalam, pandangan masyarakat terhadap hadirnya perempuan dalam ranah publik masih dianggap mengganjal dan belum familiar sehingga kehadiran perempuan di ranah public masih diragukan.

b. Keseimbangan Pekerjaan dan Keluarga

Perempuan yang bekerja sebagai pejabat publik di kota Subulussalam nyatanya masih mendapatkan tantangan dalam menyeimbangkan Antara waktu, peran domestic dan publik Antara pekerjaan dirumah (keluarga) dan pekerjaan di sektor publik (kantor). Peran ganda Antara privat dan publik, domestik dan non domestik seolah menjadikan perempuan karir atau perempuan pejabat harus pandai untuk menyusun waktu sebaik mungkin. Karena menyesuaikan waktu sangat diperlukan agar suami dan anak terlayani dengan baik ketika perempuan bekerja di luar rumah (publik). Tantangan keseimbangan pekerjaan dan keluarga, ini juga dirasakan oleh salah satu informan dalam penelitian ini, seperti yang disampaikan oleh Camat Simpang Kiri.

“Tantangan dari segi keluarga awalnya ada, waktu itu masih ada abang kan (suami) dia sempat bilang ”ah sibuknyapun, inilah itulah” mungkin dia merasa kurang terlayani dan terabaikan iya kan”.³⁷

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa seorang perempuan yang bekerja di sektor publik seolah sulit untuk mengatur dan menyeimbangkan Antara pekerjaan, waktu dan keluarga. Sehingga mendapatkan tuntutan dari suami yang merasa kurang terlayani dan terabaikan. Hal senada juga disampaikan oleh kepala dinas kesehatan

“Tantangan yang paling sulit bagi saya itu, ya menyesuaikan waktu ya, Antara beban saya di kantor dan keluarga, dulu waktu saya masih jadi staf disini saya masih sempat menjemput dan mengantar anak sekolah, tapi pas saat udah jadi kepala dinas ini, kesempatan itu tidak bisa saya dapatkan lagi”.

c. Peran sosial

Tantangan dari pihak eksternal terutama masyarakat social nyatanya masih menyelimuti para perempuan yang memiliki jabatan di ranah pemerintahan kota subulussalam. Hadirnya sebuah kebijakan yang di lahirkan oleh sebuah instansi seolah terus di pantau dan di ikuti oleh banyak orang terutama masyarakat social seperti, kelompok kepentingan, LSM, Oposisi, dan Wartawan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan

“Tantangan dari sosial politik atau peran sosial yang saya dapatkan itu ada, misalnya wartawan karena engga semua wartawan itu benar-benar *Pure* dalam tugasnya, kemudian tantangan dari LSM, LSM itu yang langsung men *judge* saya

³⁷Wawancara dengan Rahmayani Munthe, Camat Simpang Kiri, pada tanggal 24 Februari 2021 di Kota Subulussalam.

negative, tantangan kerjasama antar lembaga juga kami dapatkan dan tantangan dari kelompok oposisi itu pasti ada.”³⁸

Paparan diatas dapat disimpulkan bahwa tantangan dari peran sosial ternyata sangat kuat, seolah terlihat bahwa perempuan masih lemah dalam urusan lobi-melobi, berkomunikasi dan menghadapi kaum sosial yang tidak pernah bermain dalam permainan yang cantik (kasar) dan menjatuhkan mental perempuan.

d. Pengaruh aktivitas (organisasi)

Tantangan organisasi juga menjadi tantangan bagi perempuan yang memiliki jabatan di ranah publik. Organisasi yang merupakan sebuah wadah dimana perempuan harus dituntun untuk mejadi pribadi yang kuat dan memiliki wawasan luas, selain harus bekerja dalam sektor publik dan domestik perempuan juga harus tergabung dalam sebuah organisasi agar perempuan dapat dikenal oleh banyak orang dan menampakkan keahliannya dalam segala bidang dan menjadi nilai tawar baginya. Seperti apa yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas Simpang Kiri. “Misalnya sayakan enggak cuman sebagai Kepala puskesmas ya disini saya juga punya organisasi di luar, di organisasi Bhayangkara jadi saya harus pandai-pandai bagi waktu lah ya bagi saya itu aja sih tantangannya”³⁹

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Ketegakerjaan. ”Saya juga aktif di organisasi kebetulan saya seketaris diPKK kota

³⁸Ibid., Tanggal 24 Februari 2021

³⁹Ibid., Tanggal 13 Maret 2021

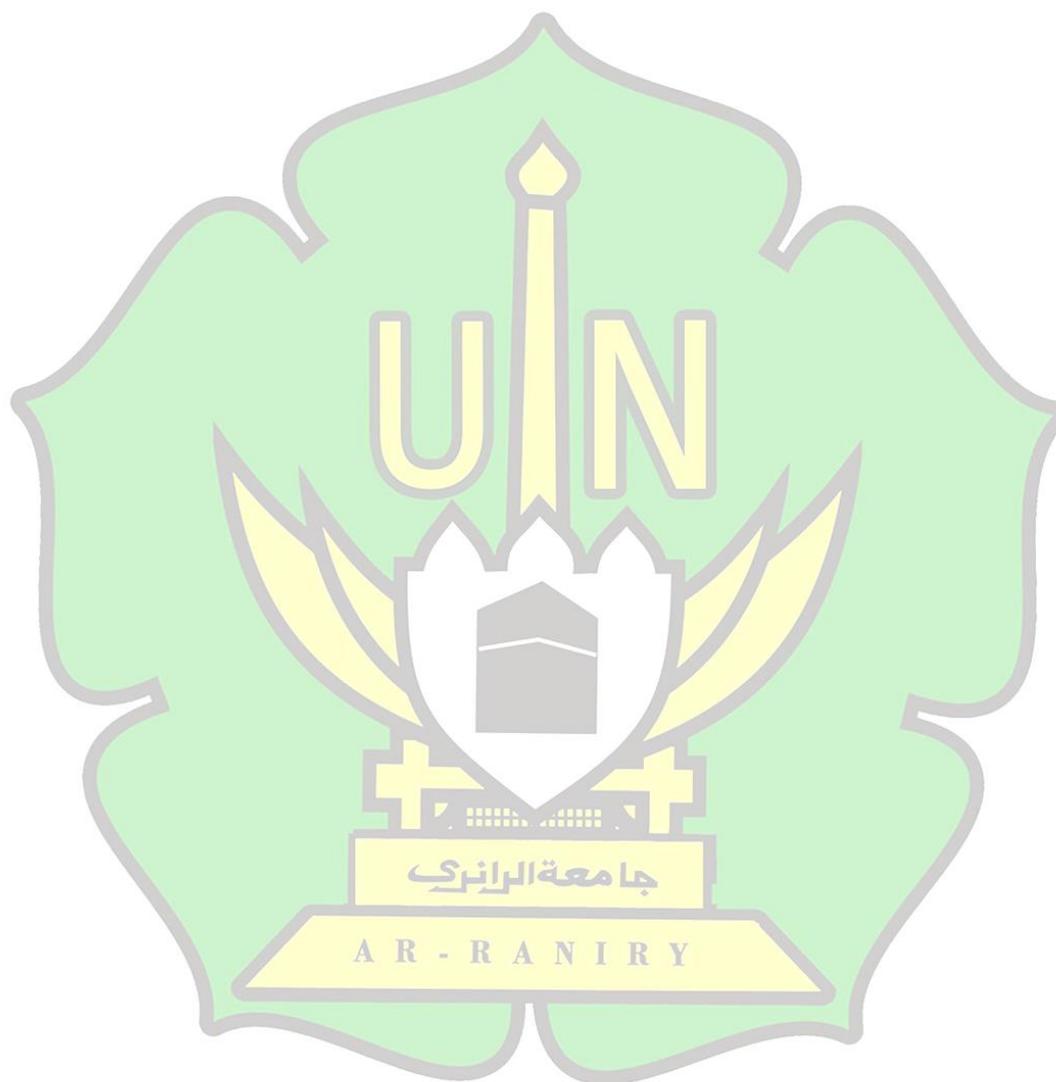
makanya saya selalu dampingin bu Walikota sebagai ketua PKKnya, sayakan dekat dengan bu wali dan seorganisasi dengan beliau”

Hasil wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perempuan yang terlibat dalam organisasi nyatanya mendapatkan tantangan dari pengaruh aktivitas organisasi yang diemban, perempuan yang ingin tampil di ranah public tentunya harus masuk dalam aktivitas organisasi dan memiliki peran agar menjalin hubungan baik dengan patron dan memperlihatkan keterampilan semenarik mungkin agar dapat diterima dan dapat di nilai sehingga menjadi pertimbangan bahwa perempuan cocok berada dalam ranah publik.

e. Komunikasi (*internal networking*)

Tantangan komunikasi nyatanya menjadi hal yang agak sulit bagi perempuan dalam menjalin hubungan sebagai pejabat publik. Khususnya studi kasus di Kota Subulussalam kebanyakan perempuan sulit dalam melakukan kerjasama dengan instansi lain, perempuan merasa agak canggung dan cenderung memiliki sifat segan dalam berkomunikasi dengan laki-laki atau pejabat lain. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Umum Rumah Sakit Ibu dan Anak. “Yang uti rasakan kesulitan dalam komunikasi itu kalau membahas masalah anggaran ya, karena uti takut karena biasanya masalah anggaran inikan laki-laki

yang lebih pande iya kan, makanya itu itu setiap mau buat atau menyusun anggaran itu selalu konsul dulu sama konsultanya kami”.⁴⁰



⁴⁰Wawancara dengan dr.Dewi Sartika Pinem, Direktur Umum Rumah Sakit Ibu dan Anak Kota Subulussalam, Pada Tanggal 23 Februari 2021, di Kota Subulussalam.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan analisa data penelitian, maka dalam bab ini penulis menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Kemudian penulis juga memberikan saran yang ada hubungannya dengan Relasi Perempuan Dalam Jabatan Publik di Pemerintah Kota Subulussalam.

5.1 Kesimpulan

Strategi dan relasi daya tawar yang diberikan oleh perempuan dalam mendapatkan jabatan strategis di instansi pemerintah Kota Subulussalam diantaranya ialah. Adanya hubungan antara pemerintah daerah dengan pejabat perempuan, hubungan tersebut berupa hadirnya praktik dinasti politik dimana pemerintah kota subulussalam menjaga klannya agar tetap diisi oleh orang-orang terdekat diantaranya saudara, semarga, sekampung/sedaerah. Kemudian hubungan kepala daerah dengan kelompok elit, untuk menjaga ritme politik kepala daerah tentu tidak sembarangan dalam memilih pejabat, oleh karenanya kepala puskesmas simpang kiri diangkat menjadi “Kapus” karena suami merupakan Kasat Intel Polres Kota Subulussalam.

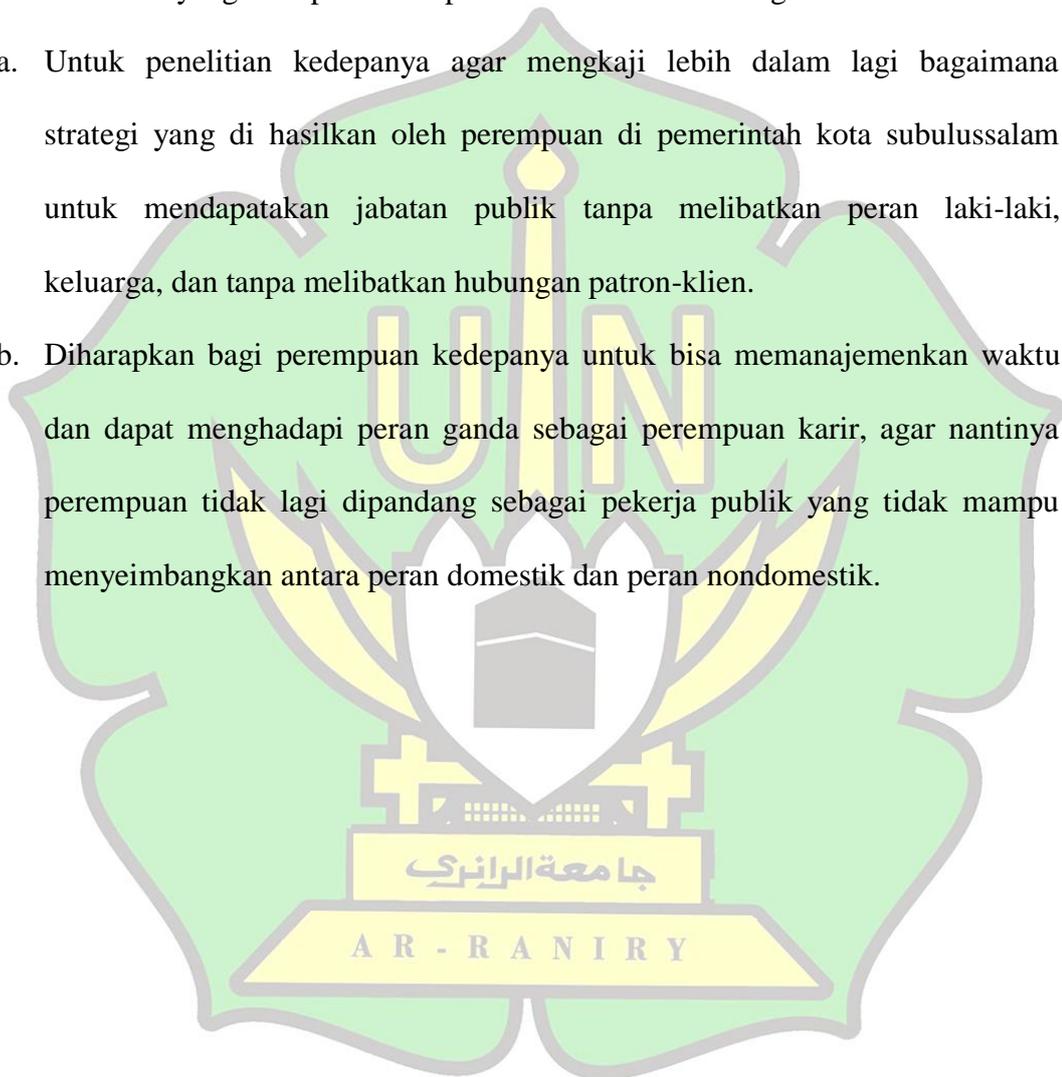
Terakhir ialah, Profesionalisme perempuan yang menjadi pertimbangan bagi kepala daerah untuk mengangkat mereka menjadi kepala dinas di kota subulussalam. Adapun tantangan yang didapatkan oleh perempuan dalam mendapatkan jabatan publik di kota subulussalam ialah, hadirnya nilai patriarki,

keseimbangan pekerjaan, komunikasi (*internal networking*), pengaruh aktivitas (organisasi), dan hadirnya peran sosial.

5.2 Saran

Berikut saran yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk penelitian kedepannya agar mengkaji lebih dalam lagi bagaimana strategi yang di hasilkan oleh perempuan di pemerintah kota subulussalam untuk mendapatkan jabatan publik tanpa melibatkan peran laki-laki, keluarga, dan tanpa melibatkan hubungan patron-klien.
- b. Diharapkan bagi perempuan kedepannya untuk bisa memanajemenkan waktu dan dapat menghadapi peran ganda sebagai perempuan karir, agar nantinya perempuan tidak lagi dipandang sebagai pekerja publik yang tidak mampu menyeimbangkan antara peran domestik dan peran nondomestik.



DAFTAR PUSTAKA

- Adelia Fitri, “Dinasti Politik pada Pemerintahan di Tingkat Lokal”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 4, No. 1 Agustus 2019.
- Allen Hicken. “*Clientalisme*”. Michigan: Department of Political Science University of Michigan. 2011.
- Anastasia. piliavsky. *patronage as politics in south asia*. New York: Cambridge University Press. 2014.
- BPS Kota Subulussalam, *Kota Subulussalam Dalam Angka 2020*, Subulussalam: Various Printing, 2020.
- Budiman M, Nasir dkk. Panduan Penulisan Skripsi Prodi Administrasi Negara Prodi Ilmu Politik FISIP, Banda Aceh: UIN Ar-Ranir, 2016.
- Chen,Li-Yu, Isabel. “*A Study of the glass ceiling an d strategies for women career advance*” Tesis. Lynn University UMI. 2005.
- Desi Ratnasari. “*Bentuk-Bentuk Patronase Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sutan Riska - Amrizal Pada Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya*” Skripsi. Universitas Andalas. 2015.
- Destya Darsiana, “*Kepemimpinan Perempuan Dalam Jabatan Publik*” (Skripsi), Fakultas FISIPOL Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2016.
- Djati,Wasisto Raharjo, “Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal”. *Jurnal sosiologi masyarakat, LabSocio Universitas Indonesia*, Vol. 18. No 2.
- Elizabeth washbrook. *Explaining the Gender Division of Labour: The Role of the Gender Wage Gap*. America: University of Bristol LA. 2007.

- Eriyanto. 2012. "Dinasti Politik dalam Pilkada: Menguntungkan atau Merugikan Kandidat? (Kasus Pilkada Kabupaten Kediri)". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Edisi 36, MIPI, Jakarta.
- Ernesto Dal Bo, Fedro Dal Bo and Jason Snyder, "Political Dynasties". Article *The Review Of Economic Studies*. 2009.
- Eunike Prapti Lestari Krissetyanti. "Women's Perceptions about Glass Ceiling in their Career Development in Local Bureaucracy in Indonesia". *Journal of Administrative Science & Organization*. Vol. 25. No. 1.2018.
- Frans Bapa Tokan, Apolonaris Gai, Yohanes Negong,"Partisipasi Politik Perempuan (Studi tentang Relasi Kuasa dan Akses Perempuan dalam Pembangunan Desa di Desa Watoone-Kabupaten Flores Timur). *Jurnal Caraka Prabhu*. Vol.4 No. 2. Desember 2020.
- Garzon Adela," Cultural Change and Familism." *Jurnal Psicothema*. Vol. 12, No. 1, 2000.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinton, *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2014.
- Herbert Kitschelt and Steven I. Wilkinson, *Patrons, Clients, and Policies*, UK: Cambridge University Press. 2007.
- Husein Hamka, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Era Modern". *Jurnal Alqalam*, Vol. 19, No. 1, Januari 2016.

James C. Scott, "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia."

Jurnal American Political Science Association. Vol. 66, No. 1 1972.

Ju Lan Thung "Women and Modernization". *Jurnal Masyarakat & Budaya*,

Vol.17, No.1, 2015.

Khalidin Hutabarat, Kip subulussalam plenokan hasil pilkada bintang salmaza

terpilih jadi paslon sah. Diakses pada tanggal 10 Desember dari situs:

<https://aceh.tribunnews.com/2018/08/13/kip-subulussalam-plenokan-hasil-pilkada-bintangalmaza-sah-jadi-paslon-terpilih>.

Khalidin, Kip Subulussalam: Meurah Sakti-Salmaza pemenang pilkada, november

2013 Diakses pada tanggal 10 Desember dari situs:

<http://www.google.com/amp/s/aceh.tribunnews.com/amp/2013/11/04/kip-subulussalam-merah-saktisalmaza-pemenang-pilkada>.

Lenka Bustikova, "Patronage, Trust, and State Capacity". *Jurnal World Politics*,

vol.2, No.2, 2017.

Leny Nofianti, "Perempuan Di Sektor Publik". *Jurnal Perempuan, Agama dan*

Gender, Vol. 15, No. 1, 2016.

Lisabona Rahman, Edriana Noerdin, Siti Aripurnama, dan Ratna Laelasari

Yuningsih, *Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era*

Otonomi Daerah, Jakarta: Women Research Institute, 2005.

Mansour Fakih, *Runtuhnya teori pembangunan dan globalisasi*, Yogyakarta:

Pustaka Pelajar.

Martien Herna Susanti,"Dinasti Politik Dalam Pilkada Di Indonesia". *Jurnal of*

Government and Civil Society. Vol. 1, No.2, 2017.

MC Kota Subulussalam, Wali Kota Lantik Perdana Camat Perempuan Di Kota Subulussalam, November 2019. Diakses pada tanggal 26 februari 2021 dari situs:<https://infopublik.id/kategori/nusantara/389736/wali-kota-lantik-perdana-camat-perempuan-di-kota-subulussalam>.

Muhammad Ihwanul Muslim dan Marwan Surya Perdhana, “Glass Ceiling: Sebuah Studi Literatur”, *Jurnal Bisnis Strategi*, Vol.1, No.1 2018.

Muji Sutrisno, Hendar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan Yogyakarta*: Kanisius, 2005.

Nancy R. Lockwood, “The Glass Ceiling: Domestic and international perspectives”, *The Journal News.com*, Vol. 2, No. 1, 2004.

Rahma Hidayati, “Gender dan Gaya Kepemimpinan Perempuan Di Jabatan Publik: Studi Fenomenologi Pelaksanaan Syariah Islam di Aceh”. *Jurnal UTU*, Vol. 4, No. 2, 2018.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007*, Tentang Pembentukan Kota Subulussalam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 08.

Rizka P.A.D, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi Pemerintahan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”. *Jurnal Unsrat*, Vol. 1, No. 1, 2018.

Roger Simon, *Gramsci's Political Thought*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 15.

Sara Mills, *Routledge Critical Thinkers: Michel Foucault*, New York: Routledge, 2003.

Subulussalam Online, hasil pilkada subulussalam ditetapkan, oktober 2008.

Diakses pada tanggal 12 Desember dari Situs:
<http://www.google.com/amp/s/subulussalamkota.wordpress.com/2008/10/28/hasil-pilkada-subulussalam-ditetapkan/amp/>.

Veale, Camilla and Gold Jefr, “Smashing Into The Glass Ceiling For Women ManagerS”. *Journal of Management Development*. Vol. 17, No. 1, 1998.

Vera Asis, “Pengaruh Glass Ceiling Terhadap Pengembangan Karir Perempuan (Studi Aparatur Sipil Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo)” *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 2, 2020.

Wasisto Raharjo Djati, “Revivalisme Kekuatan Familisme Dalam Demokrasi: Dinasti Politik Di Aras Lokal”. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*. Vol. 18, No. 2, Juli 2013.

Wawancara dengan ADP, Masyarakat Kota Subulussalam, Pada Tanggal 16 Juni, Melalui Telephone, di Banda Aceh.

Wawancara dengan DIA, Masyarakat Kota Subulussalam, Pada Tanggal 16 Juni, Melalui Telephone, di Banda Aceh.

Wawancara dengan dr.Dewi Sartika Pinem, Direktur Umum Rumah Sakit Ibu dan Anak Kota Subulussalam, Pada Tanggal 23 Februari 2021, di Kota Subulussalam.

Wawancara dengan EYC, Masyarakat Kota Subulussalam, Pada Tanggal 15 Juni, Melalui Telephone, di Banda Aceh.

Wawancara dengan H.Affan Alfian Bintang, Walikota Subulussalam, Pada Tanggal 03 Maret 2021, di Kota Subulussalam.

Wawancara dengan Isrianti, Kepala Puskesmas Simpang Kiri, pada tanggal 12 Maret 2021 di Kota Subulussalam.

Wawancara dengan IWS, Masyarakat Kota Subulussalam, Pada Tanggal 15 Juni, Melalui Telephone, di Banda Aceh

Wawancara dengan Munawaroh, Kepala Dinas Kesehatan, Pada Tanggal 14 februari 2021 di Kota Subulussalam.

Wawancara dengan Munawaroh, Kepala Dinas Kesehatan, Pada Tanggal 14 februari 2021 di Kota Subulussalam.

Wawancara dengan Rahmayani Munthe, Camat Simpang Kiri, pada tanggal 24 Februari 2021 di Kota Subulussalam.

Wawancara dengan Rahmayani Munthe, Camat Simpang Kiri, pada tanggal 24 Februari 2021 di Kota Subulussalam.

Wawancara dengan Yusmaniar, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pada tanggal 01 maret 2021 di Kota Subulussalam.

Website Pemerintah Kota Subulussalam, Profil pemerintahan Kota Subulussalam, desember 2010. Diakses pada tanggal 10 desember dari situs: <http://subulussalamkota.go.id/>.

Website resmi kota subulussalam, kepala dinas kesehatan kota subulussalam, Desember 2019. Diakses pada tanggal 26 februari 2021 dari situs: <http://subulussalamkota.go.id/pejabat/kepala-skpk>.

Website resmi kota subulussalam, kepala dinas pemberdayaan perempuan anak dan kb kota subulussalam, Desember 2019. Diakses pada tanggal 26 februari 2021 dari situs: <http://subulussalamkota.go.id/pejabat/kepala-skpk>.

Website resmi kota subulussalam, kepala dinas pemberdayaan perempuan anak dan kb kota subulussalam, Desember 2019. Diakses pada tanggal 26 februari 2021 dari situs: <http://subulussalamkota.go.id/pejabat/kepala-skpk>.

Wibowo, Dwi Edi, “Peran Ganda Perempuan Dan Kesetaraan Gender”, *Jurnal Kajian Gender: MUWAZAH*, Vol 3, No. 1, Oktober. 2012.

Yuberti, “Gender and Power in Indonesian Islam”. *Jurnal Studi Keislaman*. Vol, 15, No.2, Desember 2015.

